

Dampak Ekonomi COVID-19: Rekomendasi PSBB dan Implementasinya di Kota Makassar

Tim Peneliti LOGOV Celebes

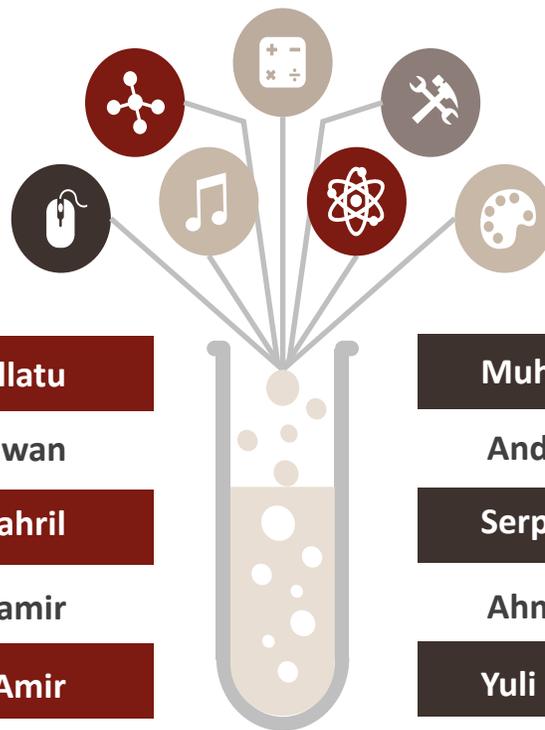


Tim Peneliti LOGOV Celebes



Tim Peneliti

Pengarah: Abdul Madjid Sallatu



Muhammad Afif Sallatu

Randi Kurniawan

Syahril

Salman Samir

Diah Astrini Amir

Muhammad Maula Razak

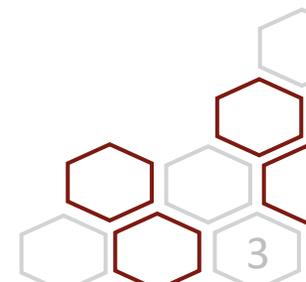
Andi Risfan Rizaldi

Serpian

Ahmad Faqhruddin

Yuli Permatasari

Khairil Anwar





Temukan kami:



Jalan Ance Daeng Ngoyo No. 8/D
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90233



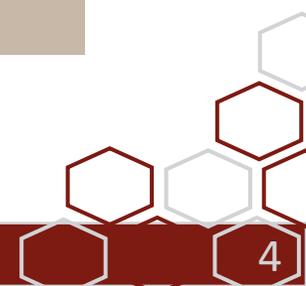
(+62) 411 467-9343
(+62) 852-9999-5447 | 895-6303-27146



office@logovcelebes.id
logovcelebes@gmail.com



LOGOVCELEBES.ID

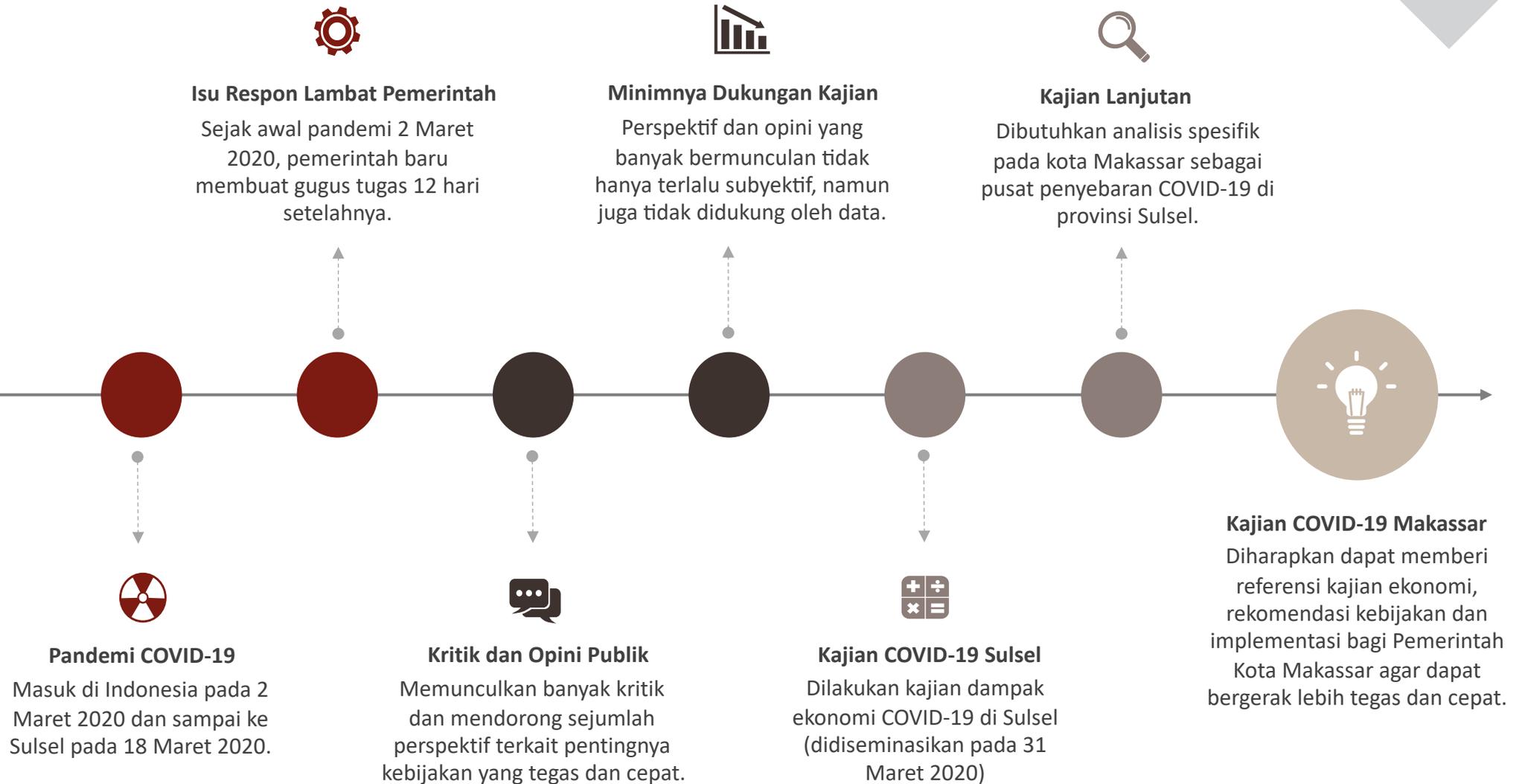




Pendahuluan



Latar Belakang





Ruang Lingkup

Skenario *Physical Distancing* vs PSBB

Aspek-aspek: sektor terdampak, pertumbuhan ekonomi, peluang ekonomi yang hilang, dan indikator pembangunan.



Kebutuhan JPS dan Ruang Fiskal

Aspek-aspek: kelompok rumah tangga (RT) 40 persen terbawah, pekerja informal di sektor terdampak, dan ruang fiskal Pemkot.

Dampak Ekonomi COVID-19

Jaring Pengaman dan Kemampuan Fiskal

1 2
3 4

Persepsi Masyarakat terhadap COVID-19

Rekomendasi Kebijakan dan Implementasi

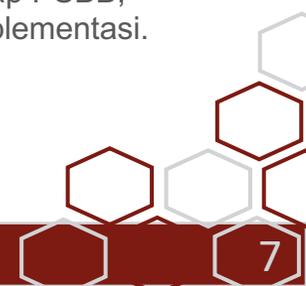
Hasil Survei Persepsi Masyarakat

Aspek-aspek: persepsi kepentingan pandemi COVID-19, persepsi kebijakan penanganan, dan akses media informasi.



Kebutuhan Kebijakan yang Tegas dan Cepat

Aspek-aspek: dukungan kajian terhadap PSBB, catatan efektifitas kebijakan, saran implementasi.





Gambaran Umum COVID-19 di Sulsel dan Kota Makassar

Kondisi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan dan Makassar



Kasus Persebaran COVID-19 Terbesar pada 5 Provinsi di Indonesia (13 April 2020)

NO	PROVINSI	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
1	DKI Jakarta	2186	142	204
2	Jawa Barat	540	22	52
3	Jawa Timur	440	73	30
4	Banten	285	7	22
5	Sulawesi Selatan	223	31	15

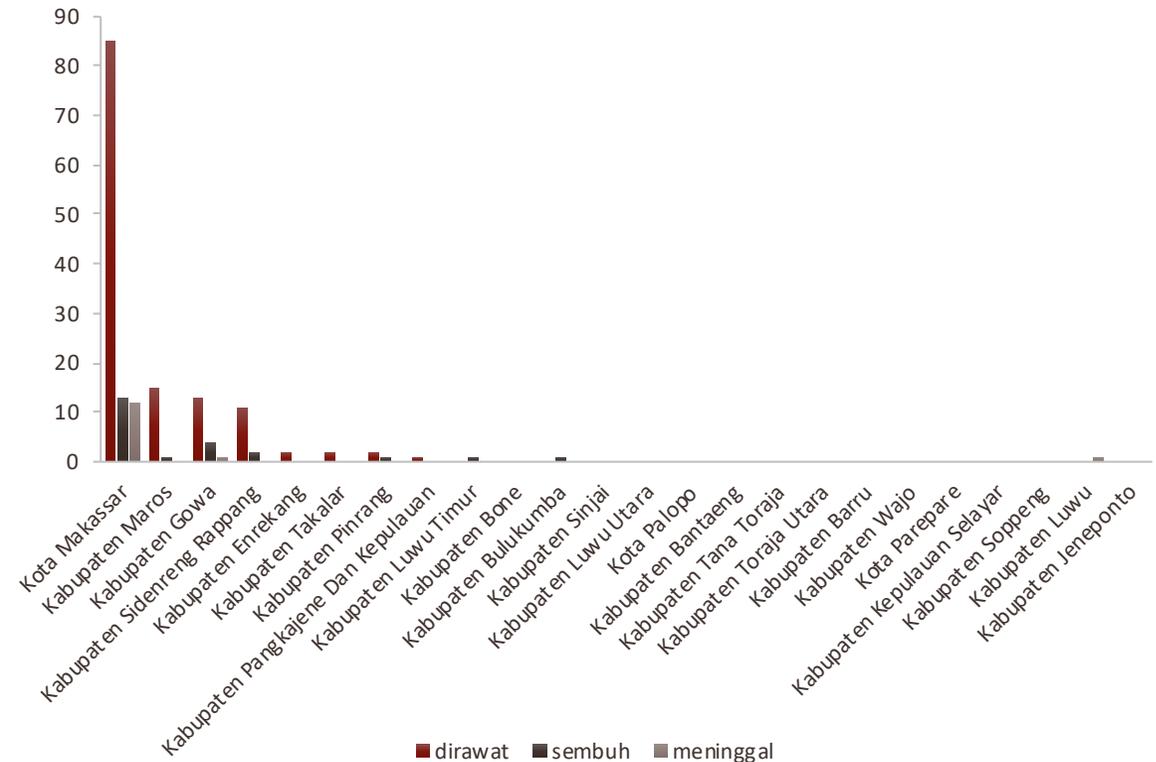
Sumber: <http://covid19.bnpb.go.id>

➤ Tanpa ada intervensi (*baseline*) jumlah kasus positif di Sulsel dapat menjadi 143.390 orang, dimana terdapat 28.678 yang memerlukan perawatan rumah sakit dan 5.736 perlu perawatan intensif.

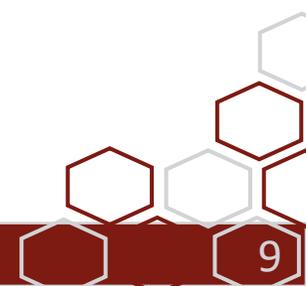
➤ Puncak pandemi akan terjadi pada bulan Mei dengan mencapai 80.000 kasus.

Sumber: Tim Peneliti UNHAS

Kasus Positif COVID-19 di Kab/Kota di Sulsel (13 April 2020)



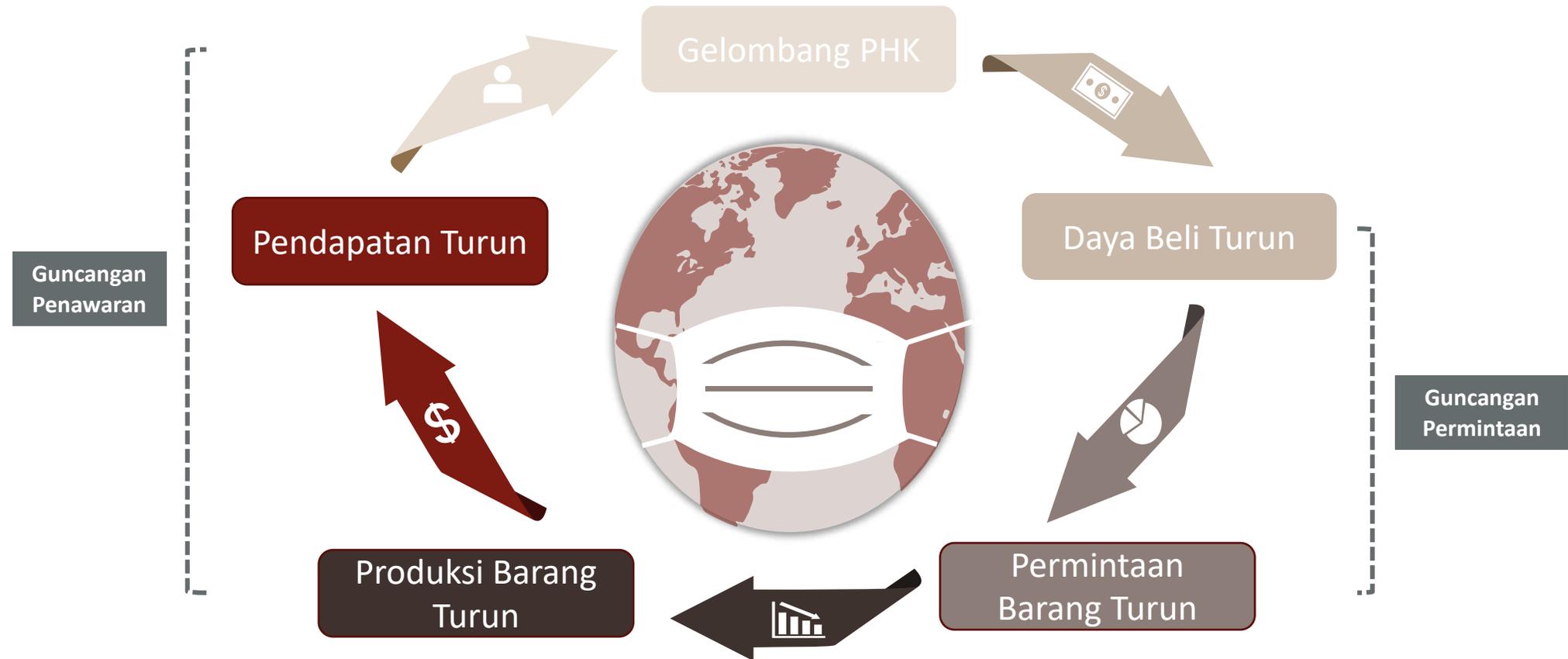
Sumber: covid19.sulselprov.go.id





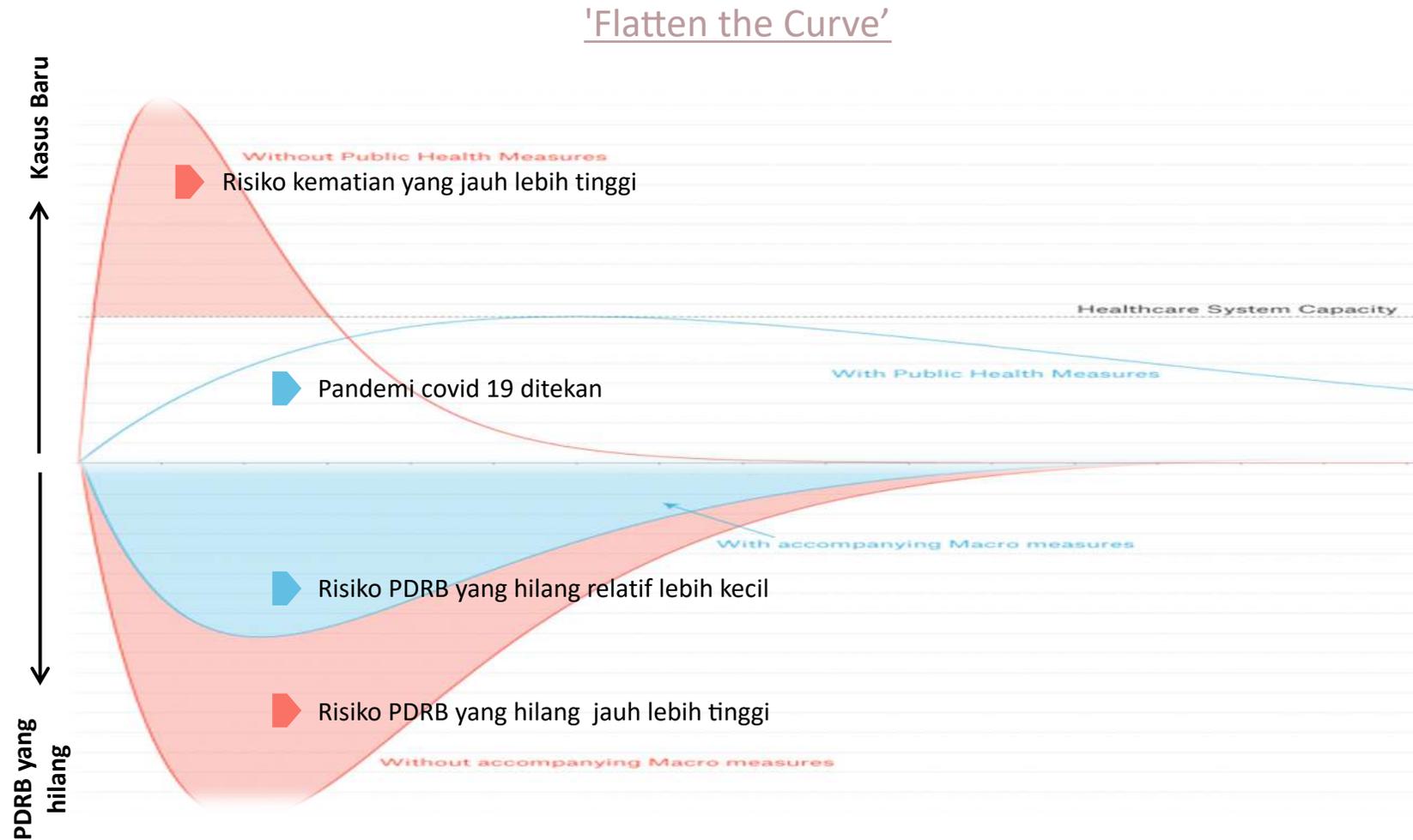
Bagaimana Pandemi COVID-19 Mengganggu Aktivitas Perekonomian?

Pandemi COVID-19 Menimbulkan Siklus Guncangan Permintaan dan Penawaran (*Supply-Demand Doom Loop*) (Fornano dan Wolf, 2020).

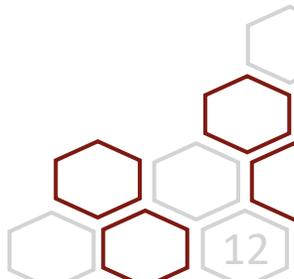


Sumber: Nugroho, 2020

Perlu penanganan yang serius agar peningkatan kasus COVID-19 dan penurunan nilai PDRB yang hilang tidak bergerak eksponensial.



Sumber: Pierre-Olivier Gourinchas, 2020



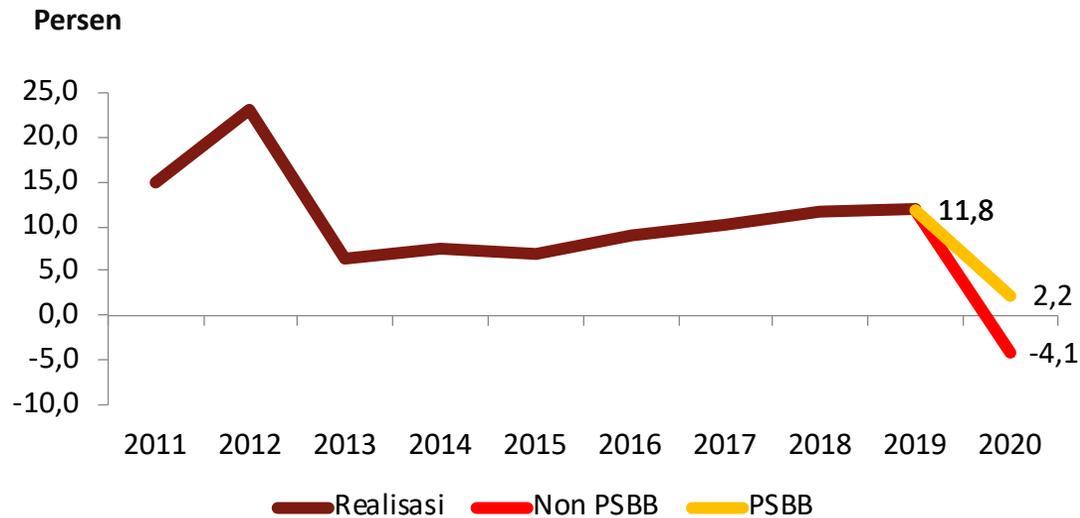


Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Lapangan Usaha serta Implikasinya bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Beberapa Indikator Pembangunan di Kota Makassar

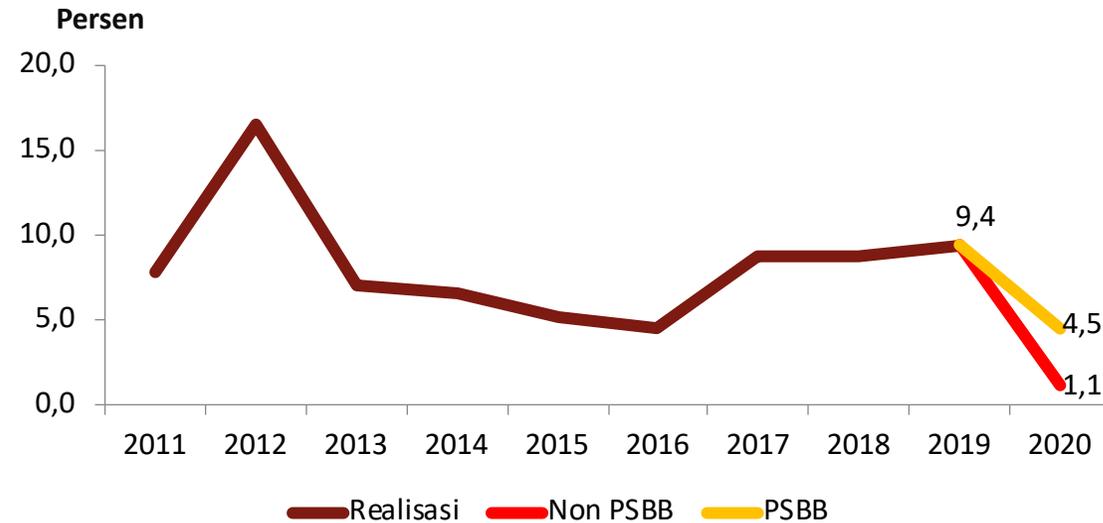
Sektor perdagangan dan transportasi mengalami penurunan signifikan.



Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Pertumbuhan Sektor Transportasi



Aktivitas belanja dan kunjungan masyarakat ke tempat keramaian melambat.



Beberapa *mall* di Kota Makassar telah ditutup.



Toko dan pusat perbelanjaan terutama di kawasan zona merah covid-19 ditutup.



Penutupan beberapa pasar dan pembatasan jadwal operasional pasar.



Permintaan sektor transportasi seperti angkutan barang, penumpang, dan pariwisata mengalami penurunan signifikan. Menurut Kadin Indonesia, omzet angkutan diperkirakan menurun, masing-masing untuk angkutan barang (25-50%), penumpang (75-100%) dan pariwisata (90-100%).

Sumber: BPS 2019, diolah

* Angka tahun 2020, diproyeksi

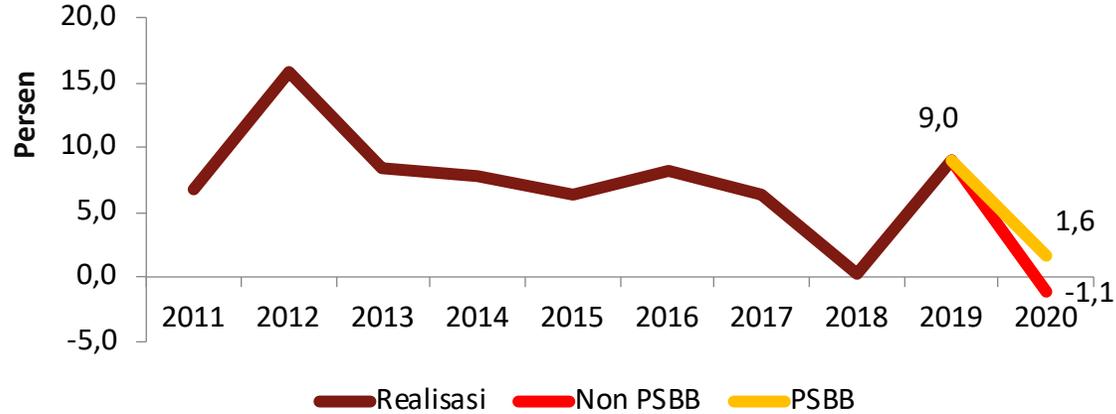
** Skenario Non PSBB ketika belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

*** Skenario PSBB ketika menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

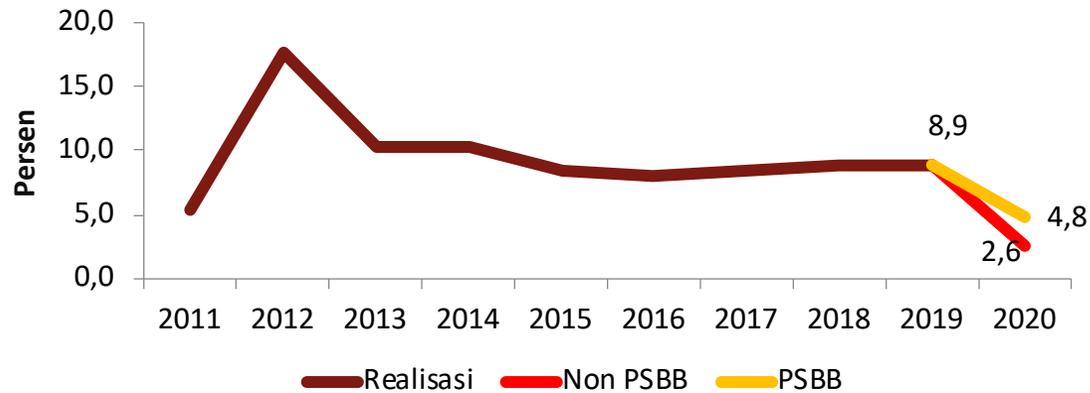


Sektor industri pengolahan menurun signifikan, sementara sektor konstruksi mengalami pelambatan.

Pertumbuhan Industri Pengolahan



Pertumbuhan Konstruksi



- ✓ Aktivitas industri dan pekerja di Makassar relatif melambat dengan penyesuaian jadwal dan pengurangan *shift*.
- ✓ Ketua dewan pengurus APINDO Sulsel memprediksi penurunan produksi manufaktur mencapai 5% di bulan April.
- ✓ Terdapat beberapa pembatalan kontrak kerjasama dengan negara yang dilanda pandemi Covid-19 seperti misalnya Cina.
- ✓ Pelambatan konsumsi masyarakat menyebabkan produksi industri makan dan minum menurun.

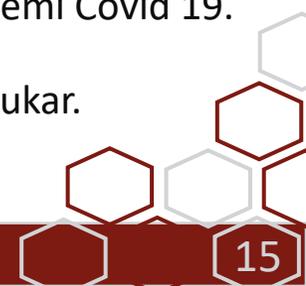
- ✓ Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengajukan surat kepada Menteri PUPR untuk mengeluarkan kebijakan penghentian sementara semua proyek konstruksi di wilayah terdampak Covid-19 selama 15-30 hari.
- ✓ Proyek pengerjaan bangunan menjadi terbengkalai karena material dan pekerjaanya kesulitan ke lokasi proyek.
- ✓ Pembangunan tol layang ruas jalan A.P. Pettarani terhambat, karena keterlambatan material impor akibat pandemi Covid 19.
- ✓ Harga bahan baku tinggi karena pelemahan nilai tukar.

Sumber: BPS 2019, diolah

* Angka tahun 2020, diproyeksi

** Skenario Non PSBB ketika belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

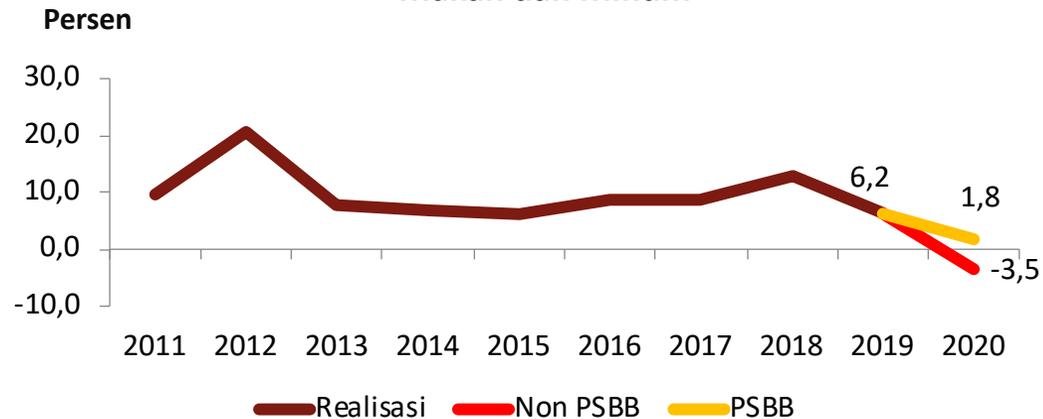
*** Skenario PSBB ketika menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)



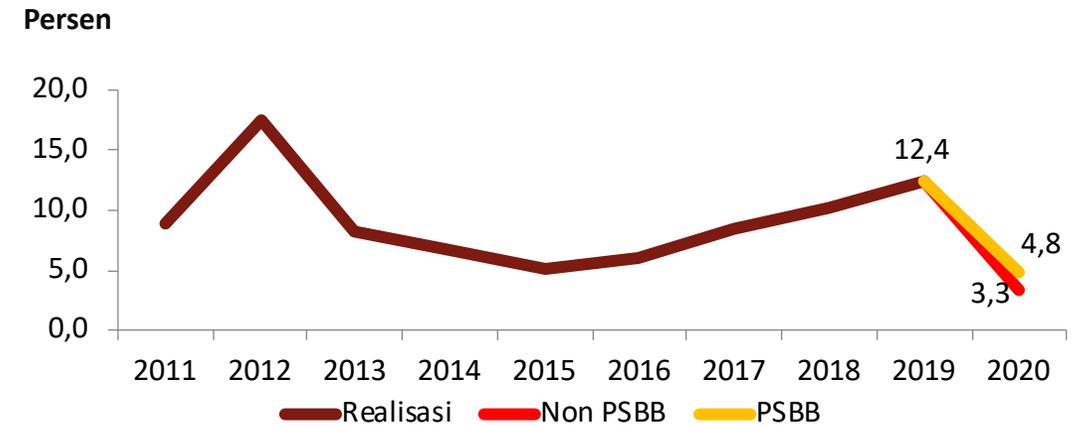
Sektor jasa penyediaan akomodasi, makan dan minum serta sektor jasa perusahaan juga terpuruk.



Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum



Pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan



- ✓ Okupansi kunjungan atau hunian hotel turun sejak presiden Jokowi mengumumkan Covid-19 masuk di Indonesia.
- ✓ Sekitar 20-an hotel tutup di pertengahan Bulan Maret.
- ✓ Beberapa restoran dan rumah makan tutup.
- ✓ Sebagian besar karyawan ataupun pegawai dirumahkan.

- ✓ Pemerintah Kota Makassar menghentikan sementara operasional usaha hiburan dan rekreasi.
- ✓ Penghentian penerbangan haji dan umroh.
- ✓ Perusahaan *travel* menerima banyak permintaan pengembalian dana/*refund* akibat dari pembatasan keluar-masuk berbagai negara.
- ✓ Bisnis hiburan menghentikan operasionalnya.

Sumber: BPS 2019, diolah

* Angka tahun 2020, diproyeksi

** Skenario Non PSBB ketika belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

*** Skenario PSBB ketika menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Makassar.

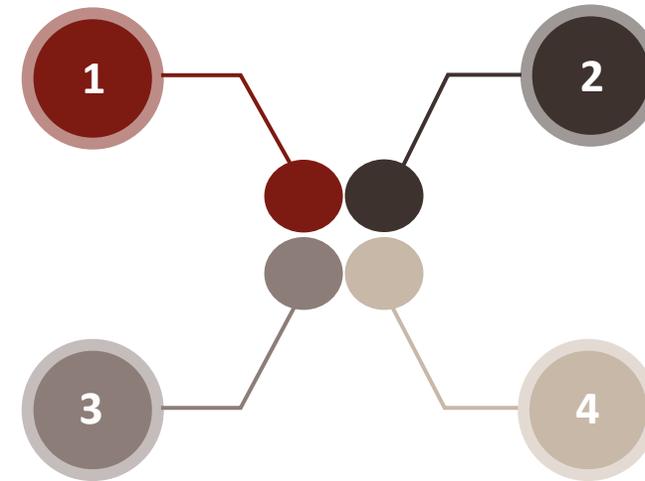


Skenario Tahun 2020

Realisasi 2019	Potential Growth	PSBB	Non PSBB
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 1			
8,8	8,6	5,7	3,4
PDRB Riil (Rp-Triliun)			
122,47	133,04	129,44	126,68
Nilai Ekonomi Hilang (Rp-Triliun) 2			
-	-	3,60	6,36
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT (Persen) 3			
10,39	10,65	14,36	17,30
Penduduk Miskin (Persen) 4			
4,3	4,4	5,9	7,0

PSBB: \searrow 3,1%
Non PSBB: \searrow 5,4%

PSBB: Rp3,60 Triliun
Non PSBB: Rp6,36 Triliun



PSBB: \nearrow 3,97%
Non PSBB: \nearrow 6,91%

PSBB: \nearrow 1,6%
Non PSBB: \nearrow 2,7%

Sumber: BPS 2019, diolah

* Angka tahun 2020, diproyeksi

** Skenario Non PSBB ketika belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

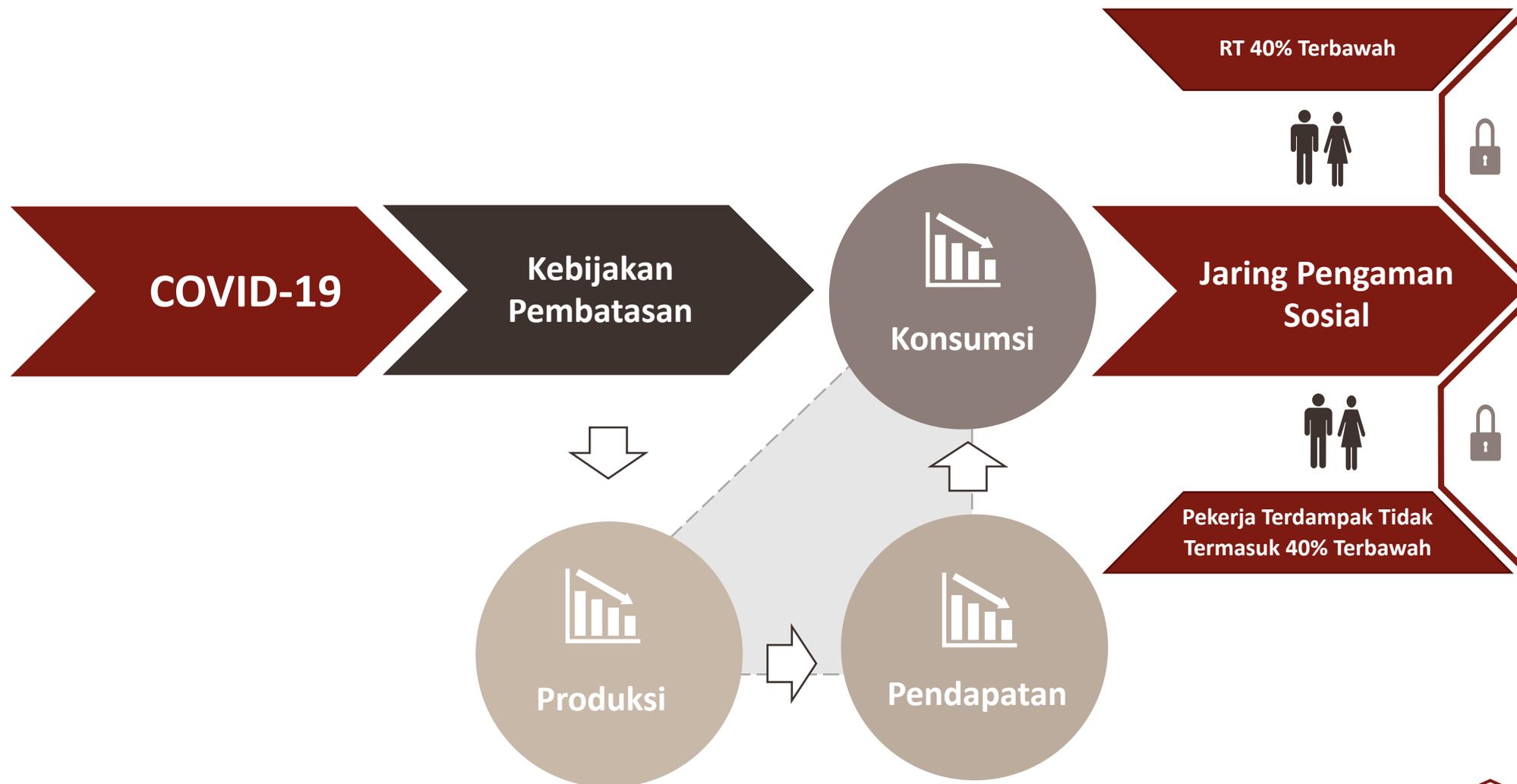
*** Skenario PSBB ketika menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)



Berapa Jaring Pengaman Sosial yang Dibutuhkan?



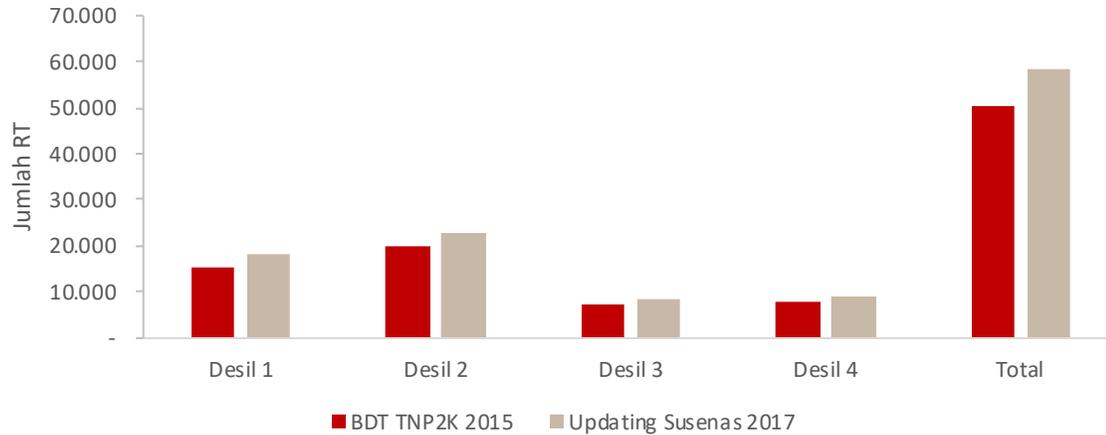
Kerangka pikir Jaring Pengaman Sosial (JPS)



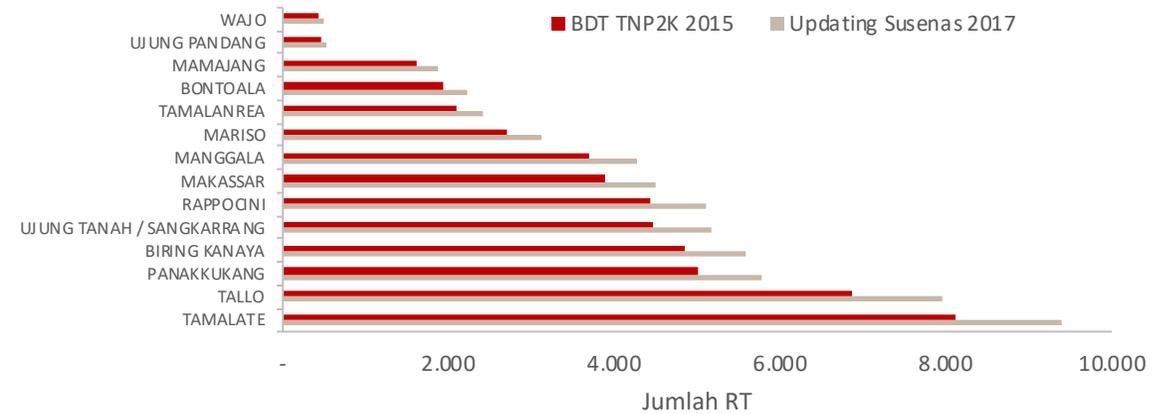


Kecamatan dengan jumlah Rumah Tangga (RT) 40% terbawah yang paling tinggi berada di Tamalate, diikuti Tallo dan Panakkukang. Sedangkan jumlah RT dengan desil 1 terbanyak terdapat di Tamalate, diikuti Tallo dan Ujung Tanah/Sangkarrang.

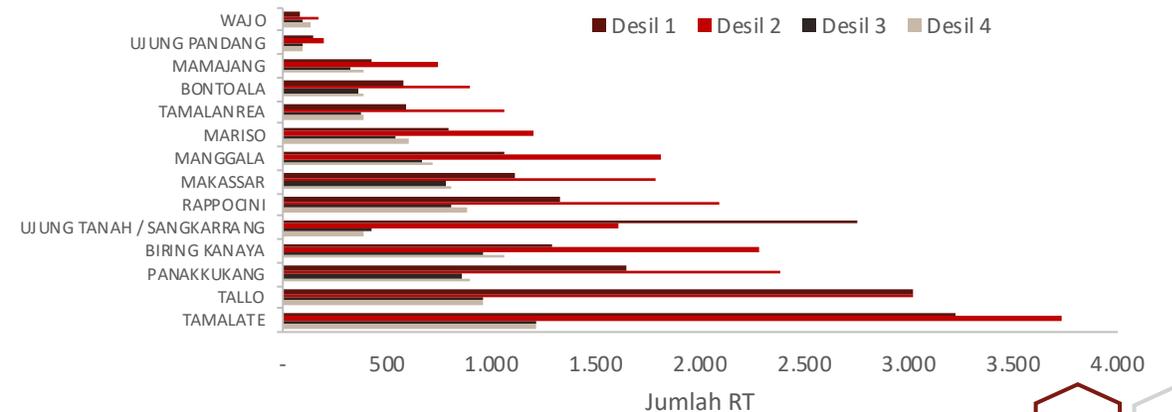
Jumlah RT 40% Terbawah di Makassar



Jumlah RT 40% Terbawah per Kecamatan di Makassar



Jumlah RT 40% Terbawah per Desil per Kecamatan di Makassar

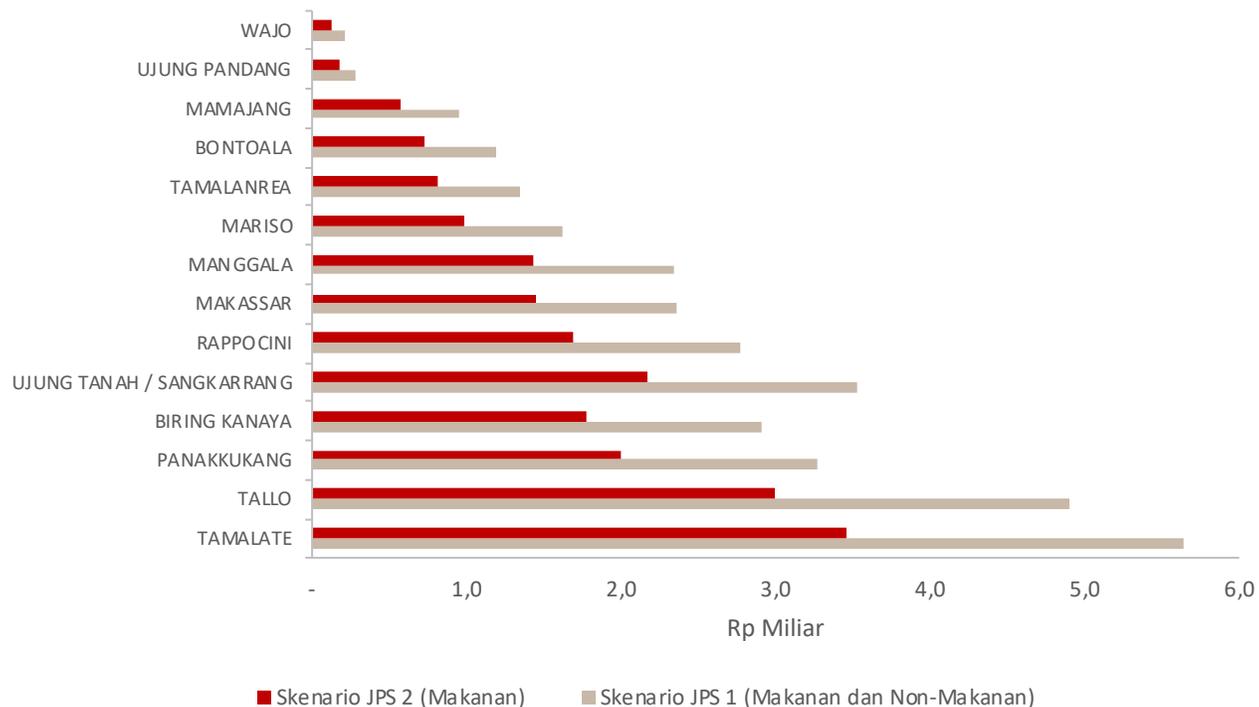


- Berdasarkan BDT TNP2K 2015, jumlah rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah di Makassar sebanyak 50.516.
- Sedangkan berdasarkan data Susenas 2017, jumlah rumah tangga sebanyak 58.362
- RT yang berada di desil 1 dan 2 paling membutuhkan pertolongan karena tingkat kesejahteraannya paling rendah.



Estimasi nilai jaring pengaman sosial di Makassar untuk RT 40 persen terbawah antara Rp61,7 Miliar hingga Rp101,7 Miliar per Bulan.

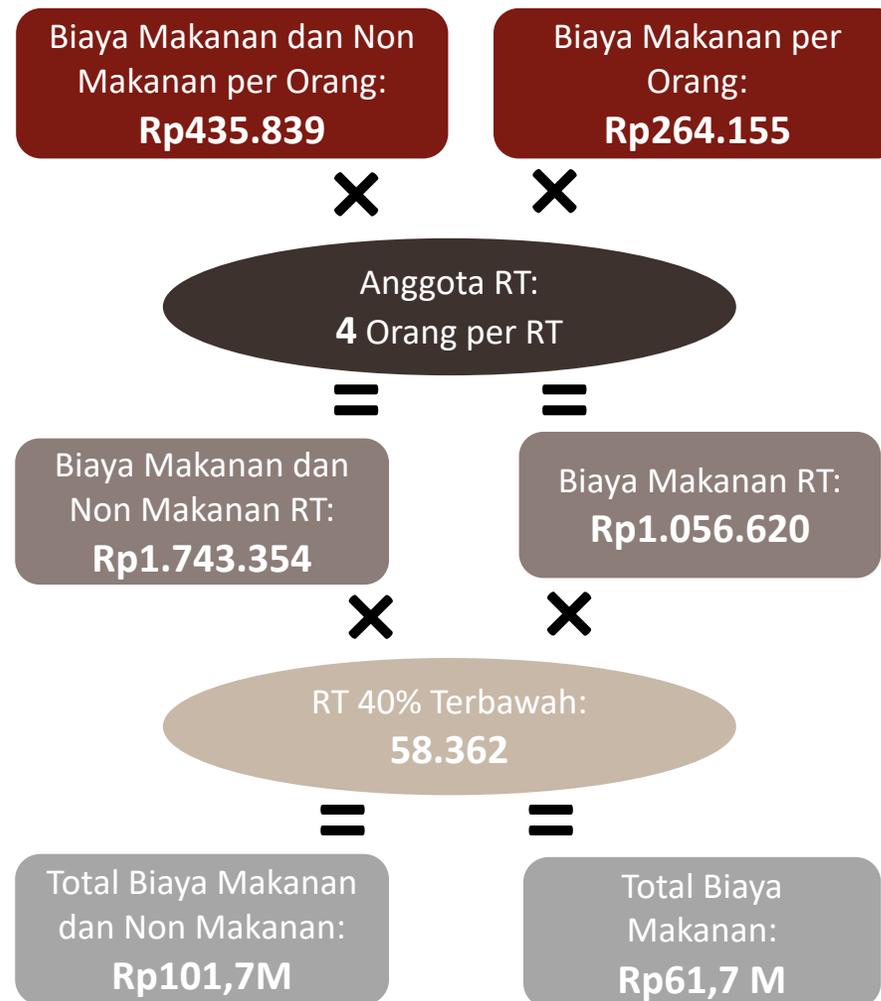
Estimasi Kebutuhan Jaring Pengaman Sosial per Kecamatan di Makassar



Sumber: Susenas 2017 dan BDT TNP2K 2015

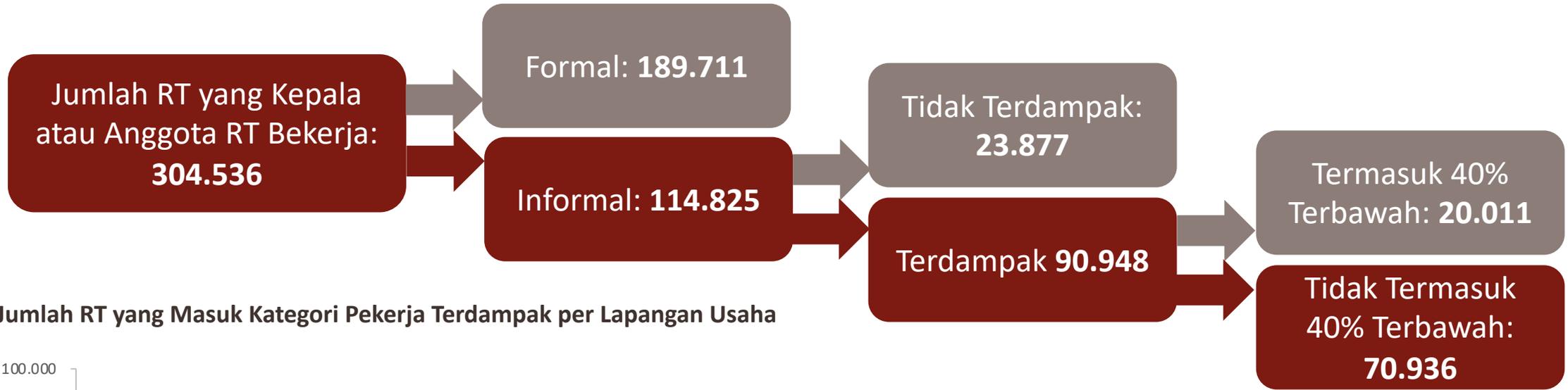
➤ Nilai pengeluaran makanan dan total pengeluaran diestimasi dari data Susenas 2017 dan di-update menggunakan inflasi hingga 2020.

Ilustrasi Perhitungan Jaring Pengaman Sosial

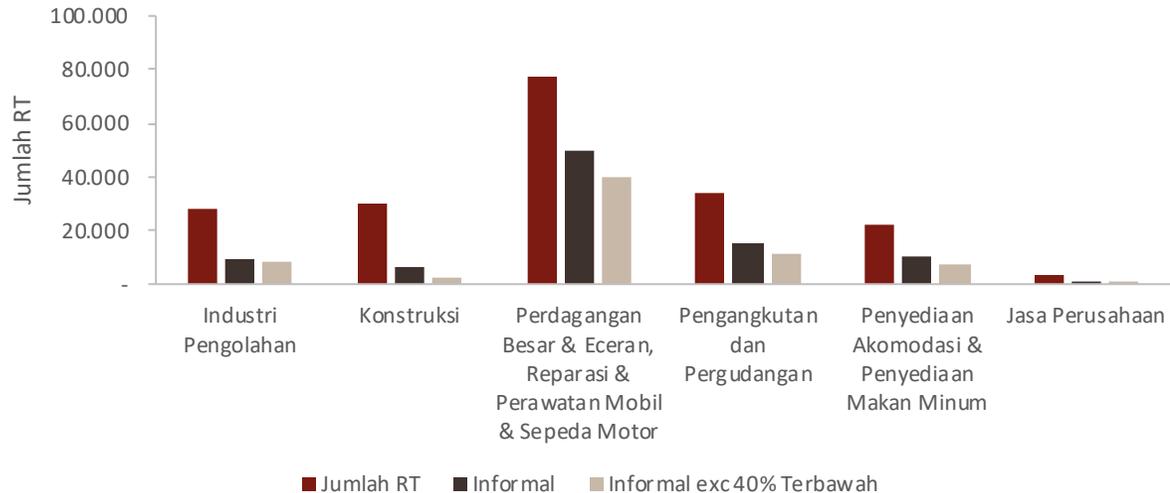




Jumlah rumah tangga pekerja informal yang terdampak, tetapi tidak termasuk dalam 40 persen terbawah sebanyak 70.936 yang tersebar di 6 (enam) lapangan usaha.



Jumlah RT yang Masuk Kategori Pekerja Terdampak per Lapangan Usaha



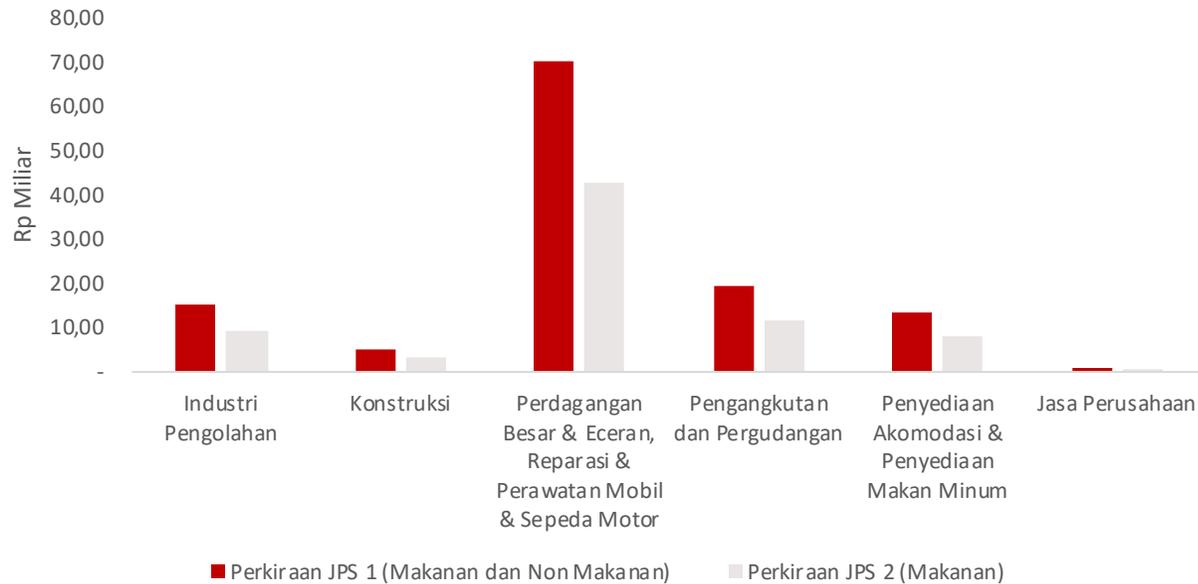
Hasil asesmen, terpilih 6 (enam) lapangan usaha yang terdampak, yaitu: industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Sumber: Susenas 2017

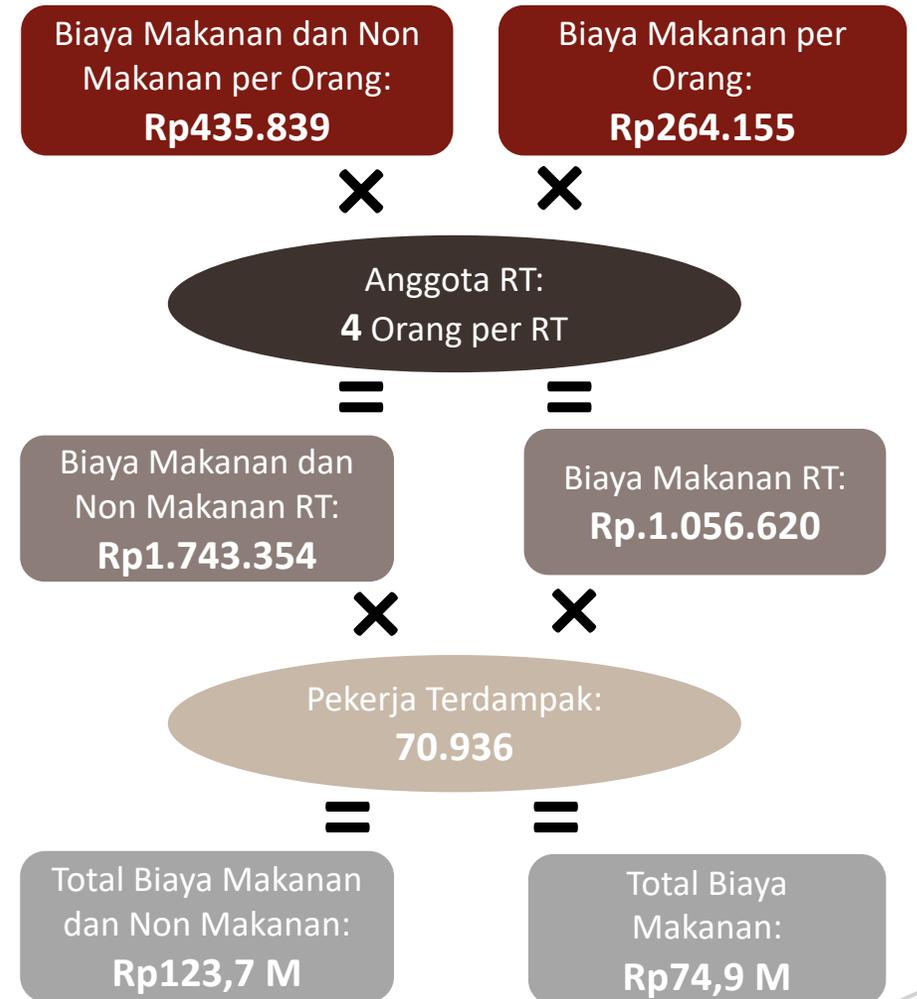
Estimasi nilai jaring pengaman sosial di Makassar untuk pekerja terdampak antara Rp74,9 Miliar hingga Rp123,7 Miliar per Bulan.



Estimasi Kebutuhan Jaring Pengaman Sosial per Kecamatan di Makassar untuk Pekerja Terdampak

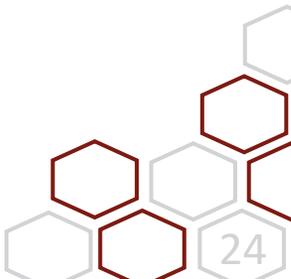


Ilustrasi Perhitungan Jaring Pengaman Sosial





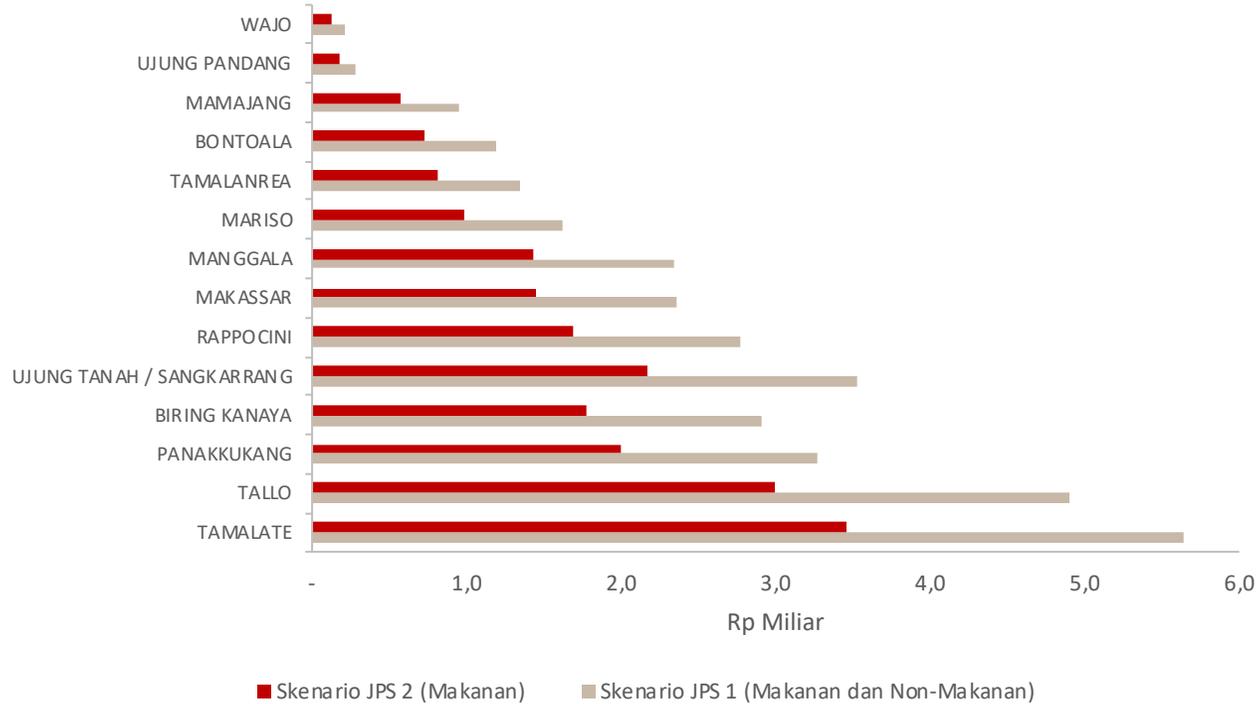
Skenario Alternatif: Menggunakan RT 20 Persen Terbawah





Estimasi nilai jaring pengaman sosial di Makassar untuk RT 20 persen terbawah antara Rp20,4 Miliar hingga Rp33,3 Miliar per Bulan.

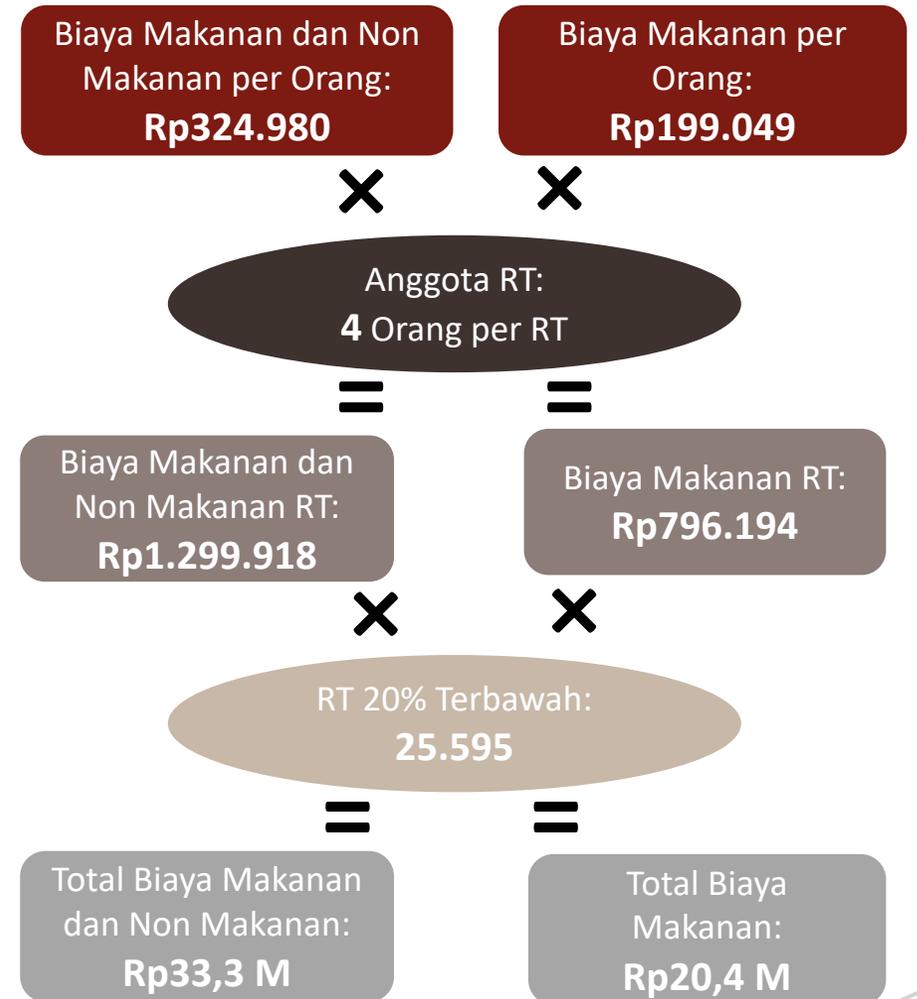
Estimasi Kebutuhan Jaring Pengaman Sosial per Kecamatan di Makassar



Sumber: Susenas 2017 dan BDT TNP2K 2015

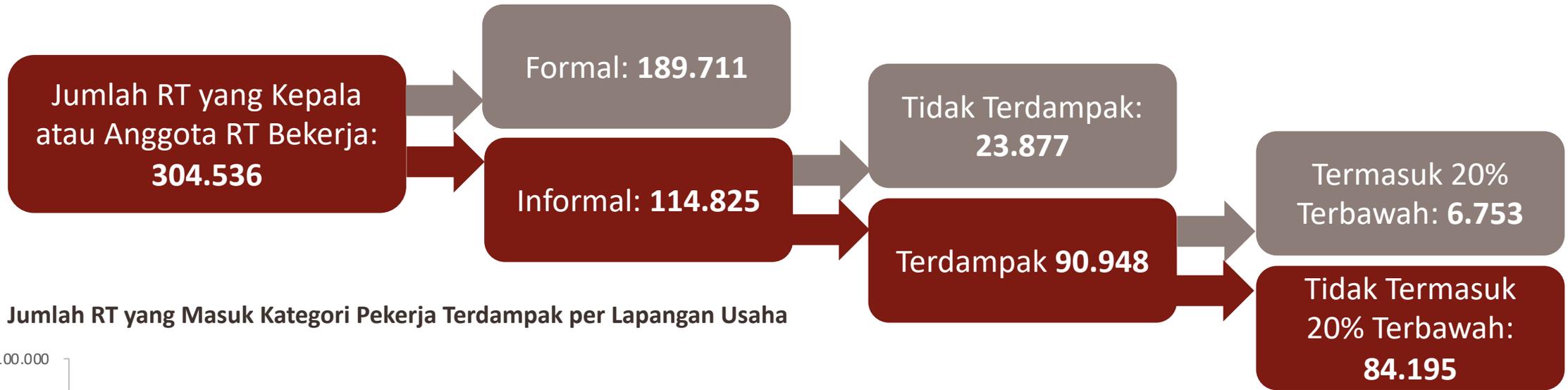
➤ Nilai pengeluaran makanan dan total pengeluaran diestimasi dari data Susenas 2017 dan di-update menggunakan inflasi hingga 2020.

Ilustrasi Perhitungan Jaring Pengaman Sosial

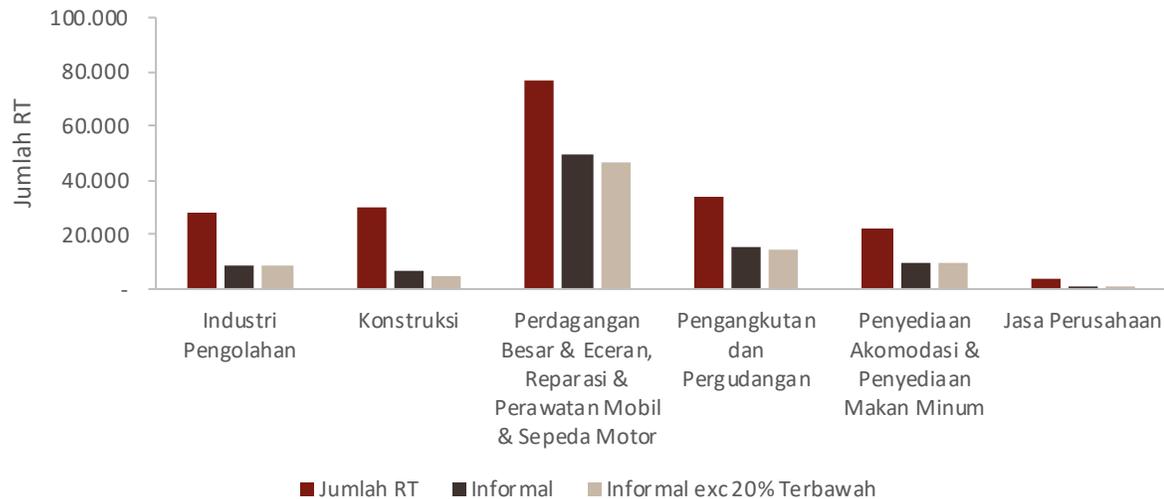




Pekerja informal yang terdampak, tetapi tidak termasuk dalam 20 persen terbawah sebanyak 84.195 rumah tangga yang tersebar di 6 (enam) lapangan usaha.



Jumlah RT yang Masuk Kategori Pekerja Terdampak per Lapangan Usaha



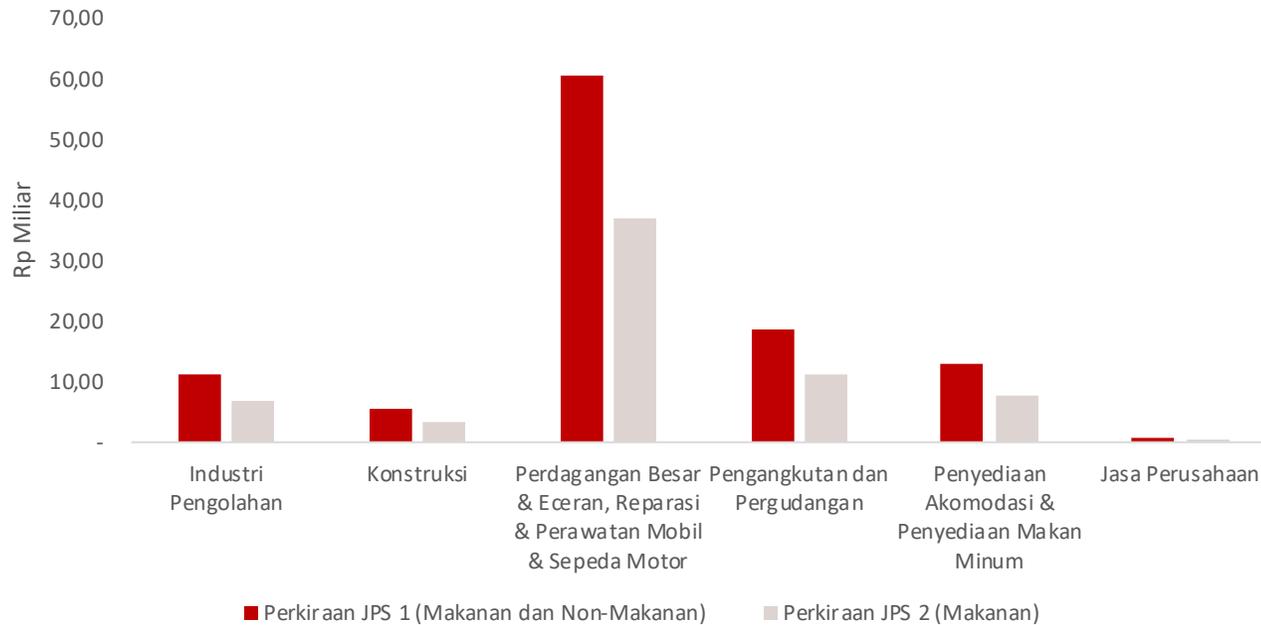
Hasil asesmen, terpilih 6 (enam) lapangan usaha yang terdampak, yaitu: industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Sumber: Susenas 2017

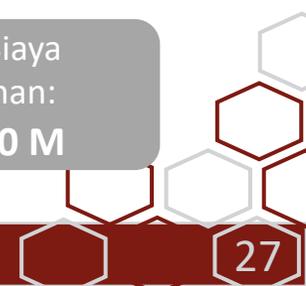
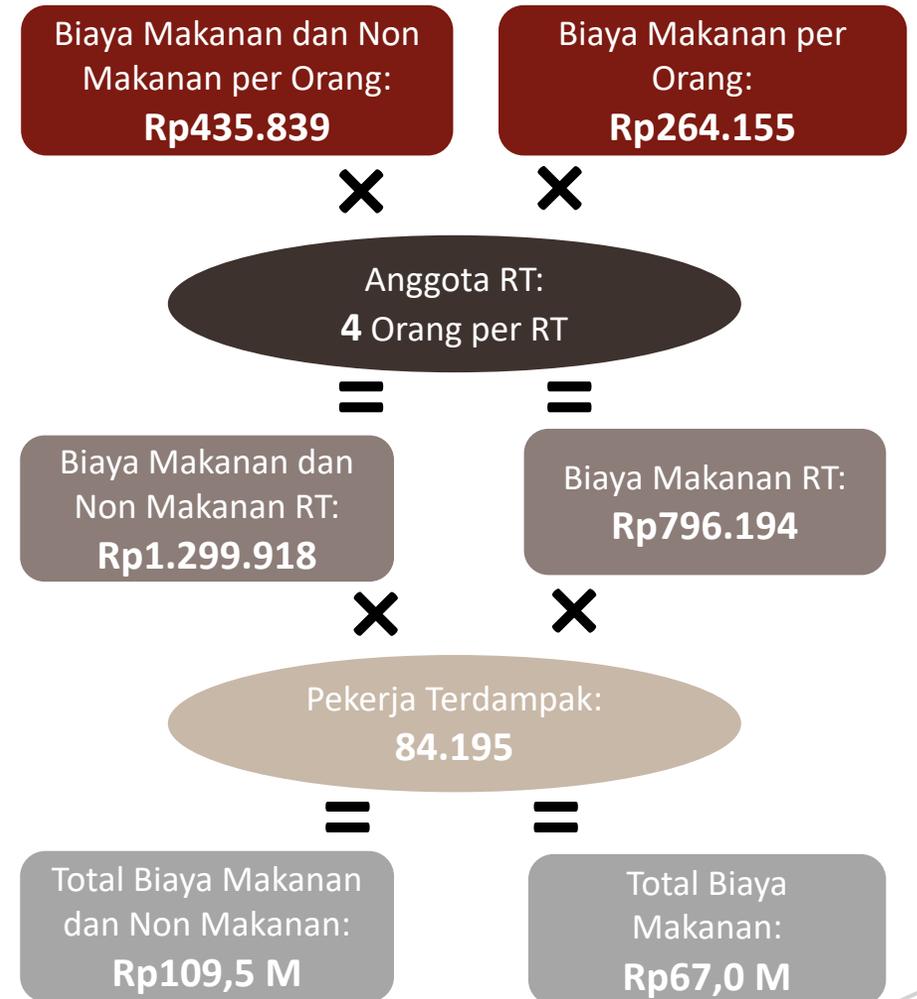
Estimasi besaran jaring pengaman sosial di Makassar untuk pekerja terdampak antara Rp67,0 Miliar hingga Rp109,5 Miliar per Bulan.



Estimasi Kebutuhan Jaring Pengaman Sosial per Kecamatan di Makassar untuk Pekerja Terdampak



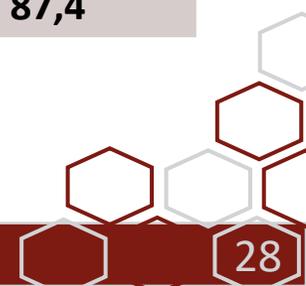
Ilustrasi Perhitungan Jaring Pengaman Sosial



Ringkasan



Uraian	Skenario 40%		Skenario 20%	
	Skenario JPS Makanan dan Non Makanan	Skenario JPS Makanan	Skenario JPS Makanan dan Non Makanan	Skenario JPS Makanan
Asumsi Rata-rata Pengeluaran Individu (Rp)	435.839	264.155	324.980	199.049
Asumsi Jumlah Individu per RT	4	4	4	4
Rata-rata Pengeluaran per Rumah Tangga (Rp)	1.743.354	1.056.620	1.299.918	796.194
Jumlah RT (40%/20%)	58.362	58.362	25.595	25.595
Jumlah Pekerja Terdampak	70.936	70.936	84.195	84.195
Total JPS RT (40%/20%) (Rp-Miliar)	101,7	61,7	33,3	20,4
Total JPS Pekerja Terdampak (Rp-Miliar)	123,7	74,9	109,5	67,0
Total (Rp-Miliar)	225,4	136,6	142,8	87,4





Bagaimana Kemampuan Fiskal yang Dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar?

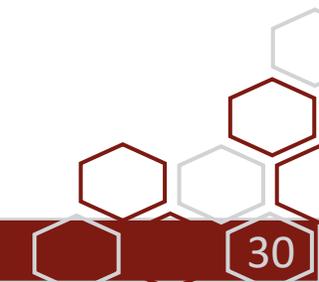
Estimasi Postur Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2020

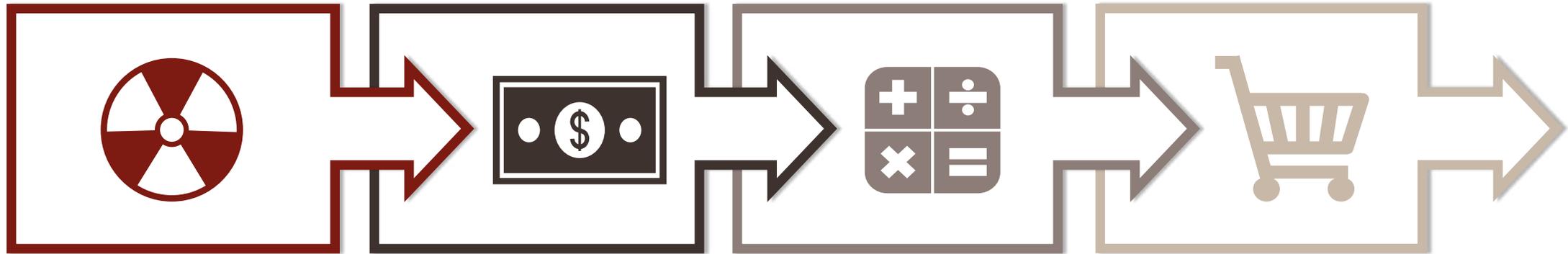


Uraian	Semula	Menjadi*	Selisih	% Perubahan
PENDAPATAN DAERAH *	4.138.870.000.000	3.167.091.947.440	(971.778.052.560)	(23,48)
PAD*	1.749.402.916.000	981.394.735.020	(768.008.180.980)	-43,90
Dana Perimbangan*	1.852.453.378.000	1.648.683.506.420	(203.769.871.580)	-11,00
Lain-Lain PAD yang Sah	537.013.706.000	537.013.706.000	0	0
BELANJA DAERAH*	4.217.870.000.000	4.339.766.443.000	121.896.443.000	2,89
SURPLUS/DEFISIT*	(79.000.000.000)	(1.172.674.495.560)	(1.093.674.495.560)	1384.40
Pembiayaan Netto	79.000.000.000	79.000.000.000	0	0

Sumber: makassarkota.go.id, diolah

* Hasil estimasi berdasarkan elastisitas terhadap PDRB





1st

Jaring Pengaman Sosial dan Pandemi COVID-19

Implikasi pandemi COVID-19 menuntut pemerintah agar menyiapkan jaring pengaman sosial untuk menjamin konsumsi RT. Terutama jika akan melakukan PSBB.

2nd

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mendapatkan gambaran terkait kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman, maka perlu diketahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah (kemampuan fiskal).

3rd

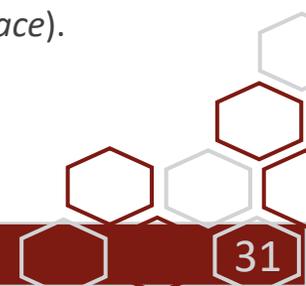
Fleksibilitas Kemampuan Fiskal Daerah

Hal pokok bagi kemampuan fiskal daerah agar dapat berperan sebagai salah satu penopang jaring pengaman melekat pada seberapa banyak anggaran yang secara fleksibel dapat realokasi.

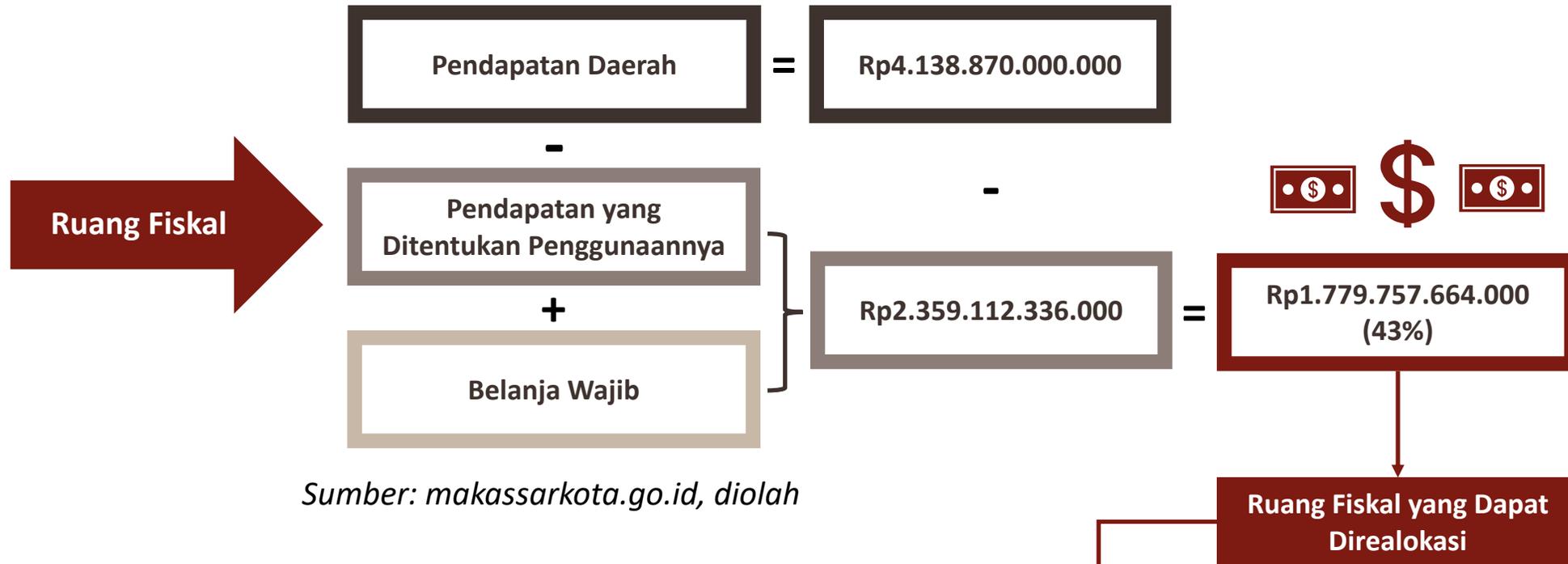
4th

Ruang Fiskal Daerah

Secara umum, fleksibilitas realokasi anggaran dikenal dengan istilah ruang fiskal (*fiscal space*).



Ruang Fiskal Pemerintah Kota Makassar

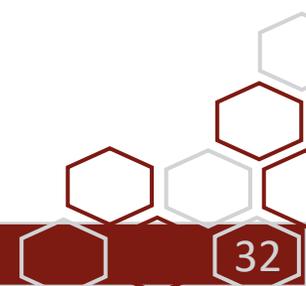


Sumber: makassarkota.go.id, diolah

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran-anggaran yang dapat dialokasi.



→ Tentu anggaran ini tidak dapat dialokasi seluruhnya, karena akan berdampak terhadap tidak adanya program Pemerintah Kota Makassar yang dapat berjalan.



Realokasi anggaran tahap 1: penyaringan pada tingkat OPD



Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

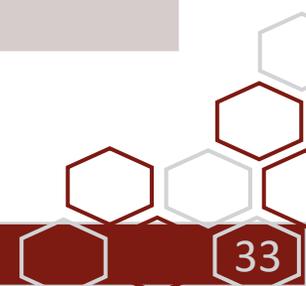
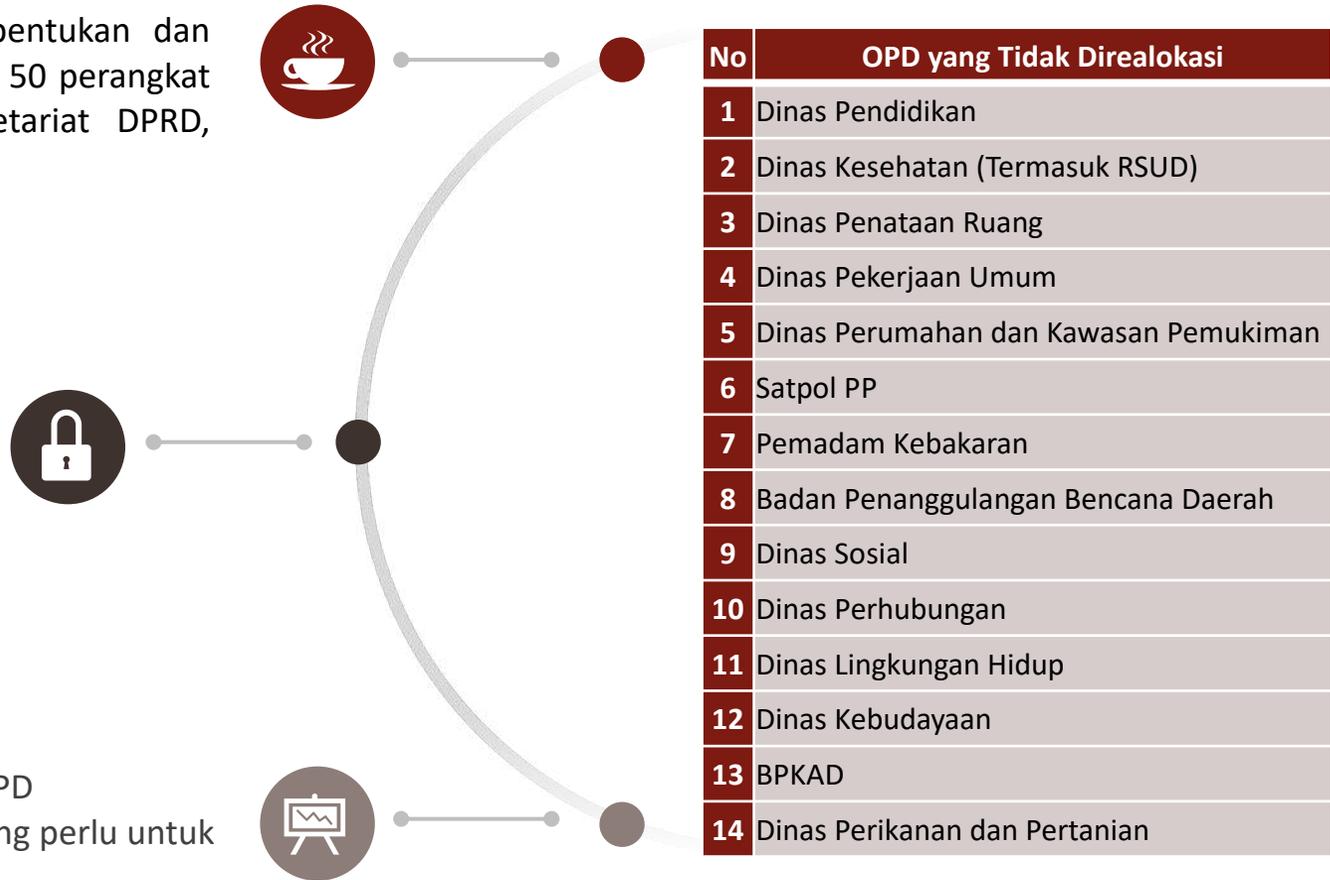
Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemkot Makassar memiliki 50 perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 26 Dinas, 6 Badan, dan 15 Kecamatan.

Instrumen Penyisiran Tahap 1

Penyisiran pada tahap 1 dilakukan dengan mengeliminasi OPD yang memiliki *share* besar terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar. Pemilihan OPD mengacu pada 3 (tiga) dasar: 1) Dokumen Standar Pelayanan Minimal; 2) Arah kebijakan RPJPD Makassar 2005-2025; dan 3) Prioritas Sulsel 2018-2023

Hasil Eliminasi OPD

Berdasarkan pada 3 (tiga) dasar dalam mengeliminasi OPD sebelumnya, didapatkan setidaknya terdapat 14 OPD yang perlu untuk dikeluarkan dalam perhitungan realokasi anggaran.



Realokasi anggaran tahap 2: penyaringan pada tingkat kegiatan



Total Kegiatan 36 OPD

Terdapat setidaknya 1.738 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp900 Miliar

Total Kegiatan Realokasi

Dari hasil penyisiran, didapatkan 566 kegiatan yang dapat direalokasi anggarannya berdasarkan persentase yang ditentukan pada masing-masing kriteria.



Hasil Penyaringan Tahap 1

Tersisa 36 (dari 50) OPD yang relevan untuk dilakukan realokasi anggaran.

Kriteria Realokasi Kegiatan

Ditentukan setidaknya 4 (empat) kegiatan yang direalokasi: 1) *event*/seremonial (75%); 2) sosialisasi (75%); 3) pengadaan fisik (50%); dan 4) perjalanan dinas (75%).

Total Anggaran Realokasi

Dari 566 kegiatan tersebut, didapatkan anggaran realokasi sebesar Rp180 Miliar.

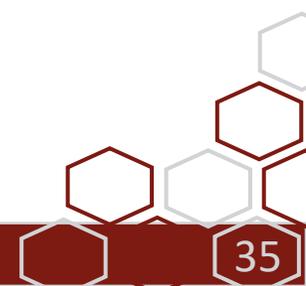
Estimasi kemampuan fiskal Pemerintah Kota Makassar terhadap penyediaan JPS ketika PSBB diberlakukan.



Skenario RT 40% Terbawah		
Kebutuhan (Rp-Miliar)	Realokasi (Rp-Miliar)	Selisih (Rp-Miliar)
JPS Makanan dan Non-Makanan		
225,4	180,36	-45,04
JPS Makanan		
136,6	180,36	43,76

Skenario RT 20% Terbawah		
Kebutuhan (Rp-Miliar)	Realokasi (Rp-Miliar)	Selisih (Rp-Miliar)
JPS Makanan dan Non-Makanan		
142,8	180,36	37,56
JPS Makanan		
87,4	180,36	92,96

Sumber: makassarkota.go.id, diolah



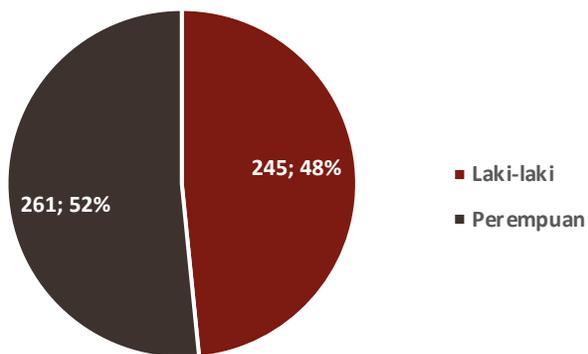


Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Kegentingan dan Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Makassar?

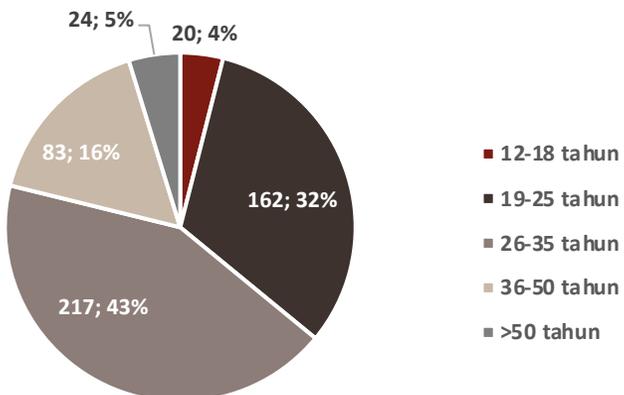
Gambaran Umum Survei



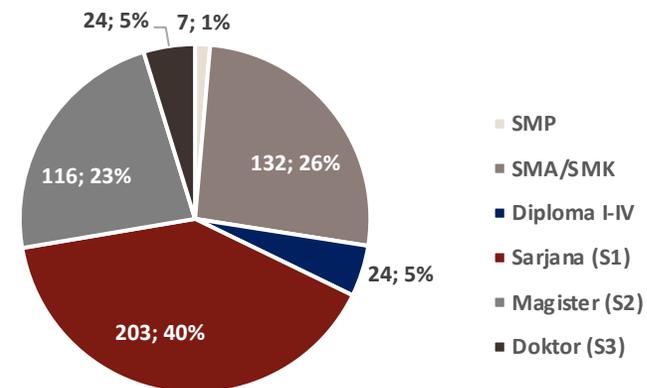
Jenis Kelamin



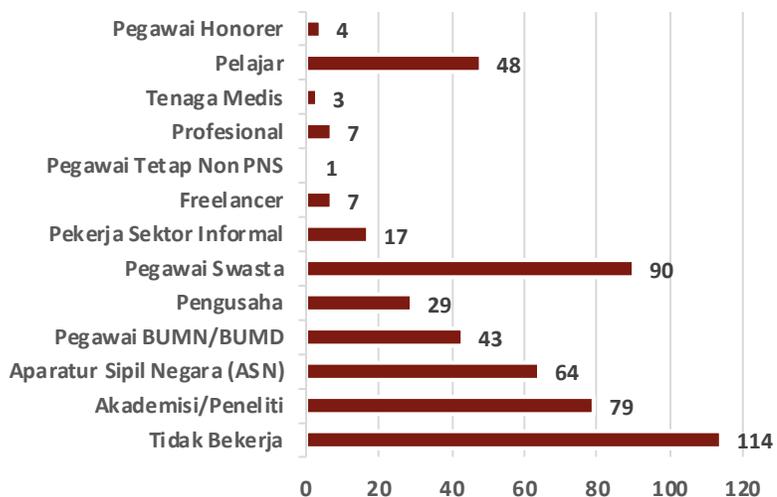
Usia



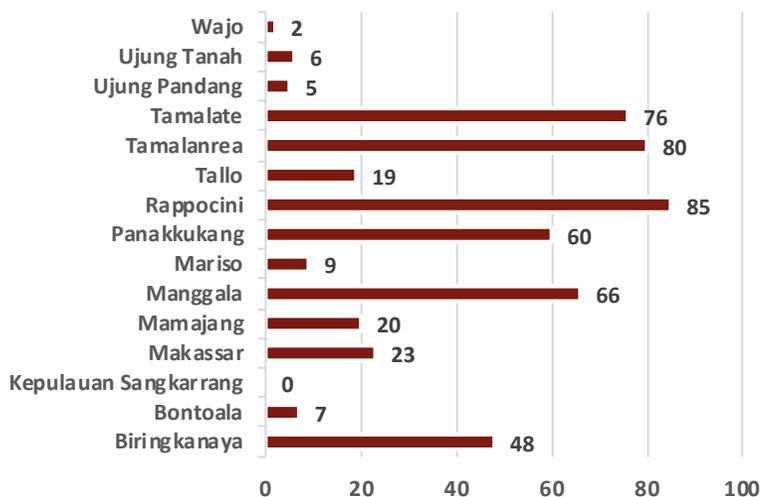
Pendidikan Terakhir



Pekerjaan



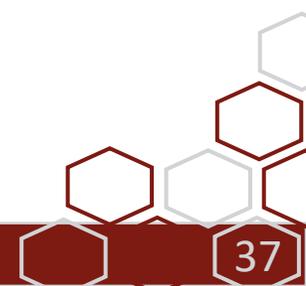
Kecamatan Tempat Tinggal



5 Hari: 4-8 April 2020

506 Responden (514)

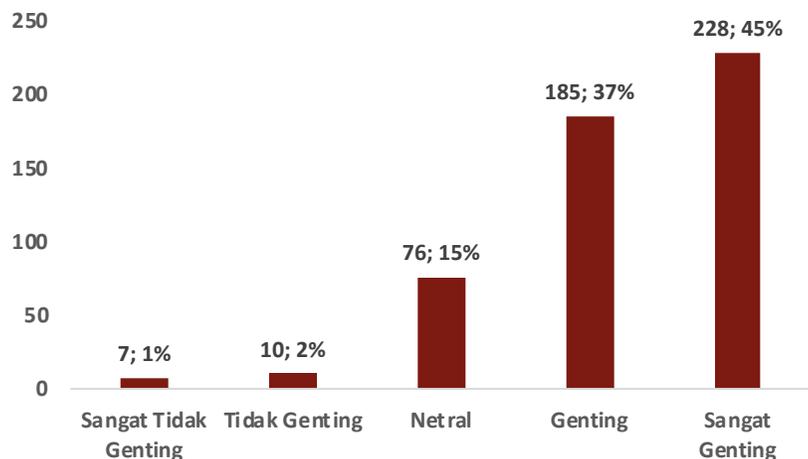
Survei - Daring



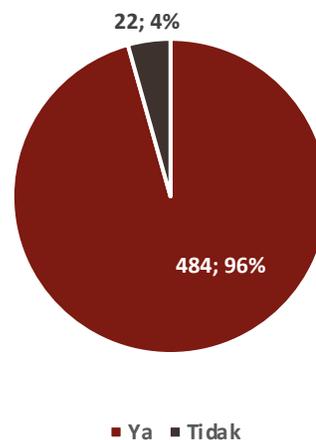
Persepsi Kegentingan Masyarakat



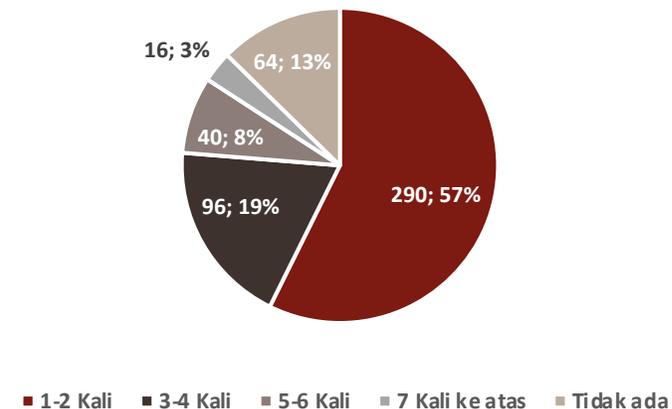
Persepsi Kegentingan Pandemi COVID-19 di Kota Makassar



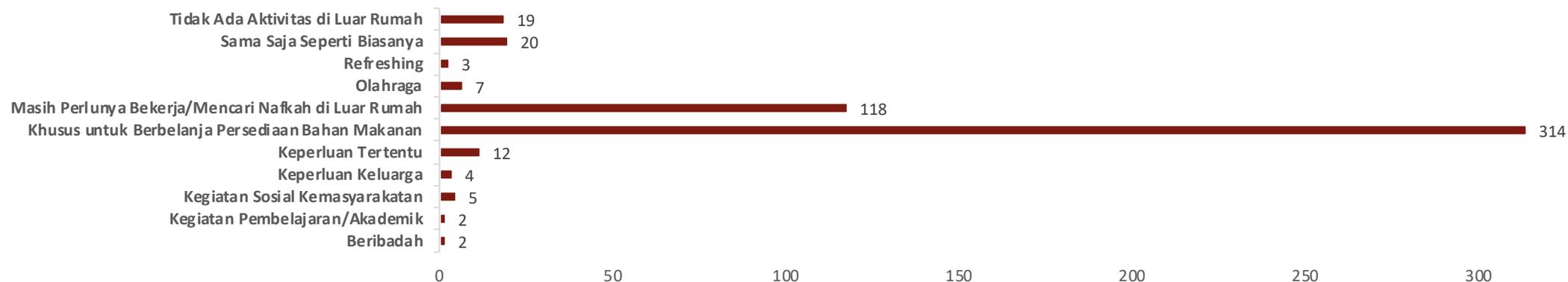
Melakukan Pengurangan Aktivitas di Luar Rumah (Satu Minggu Terakhir)



Rata-rata Melakukan Aktivitas di Luar Rumah (Satu Minggu Terakhir)



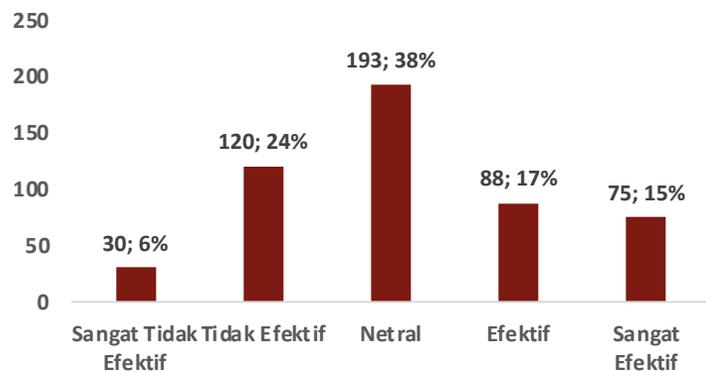
Umumnya Melakukan Aktivitas di Luar Rumah dalam Rangka



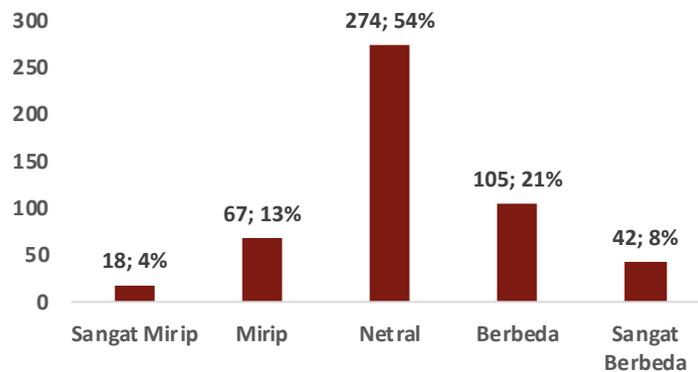
Persepsi terhadap Kebijakan Penanganan



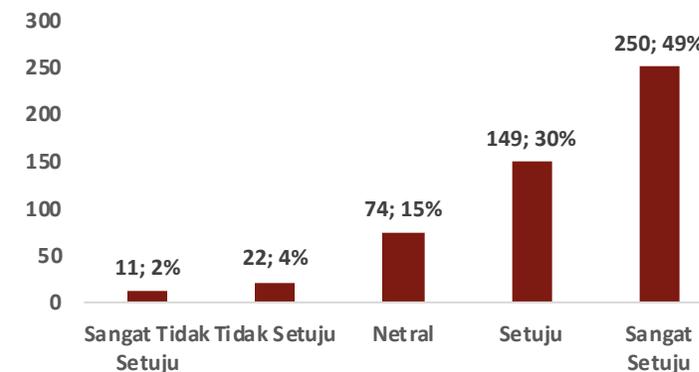
Persepsi Efektifitas Himbauan *Social/Physical Distancing* di Kota Makassar



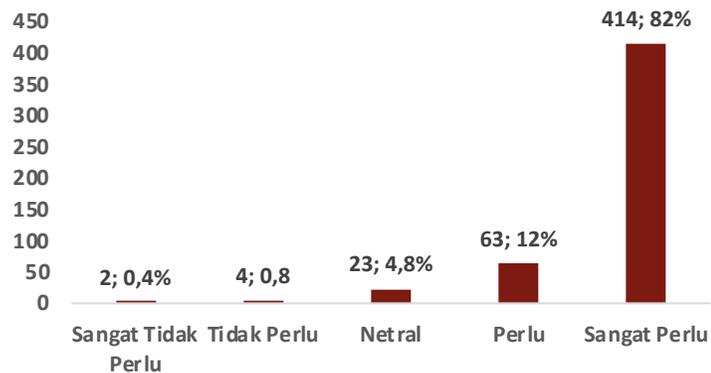
Persepsi terhadap Perbedaan Penerapan PSBB dengan yang Telah Dilakukan Sebelumnya



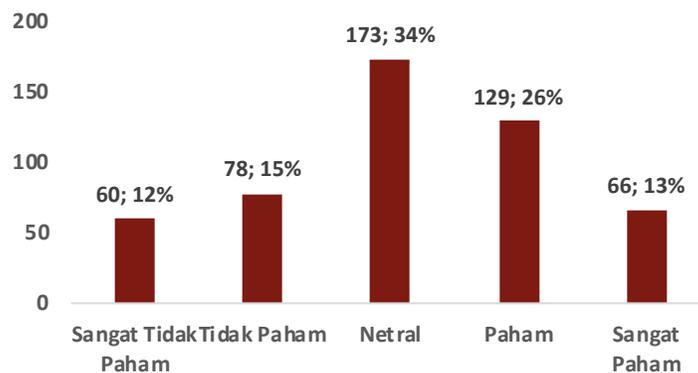
Persepsi terhadap Penerapan Kebijakan Karantina Wilayah di Kota Makassar



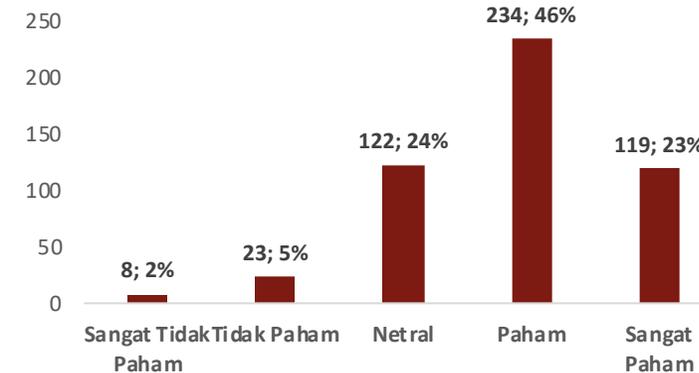
Persepsi terhadap Perlunya Kebijakan yang Lebih Tegas



Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan PSBB



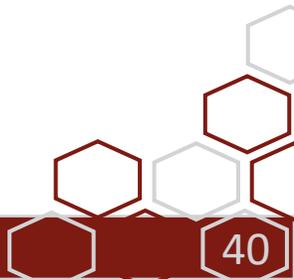
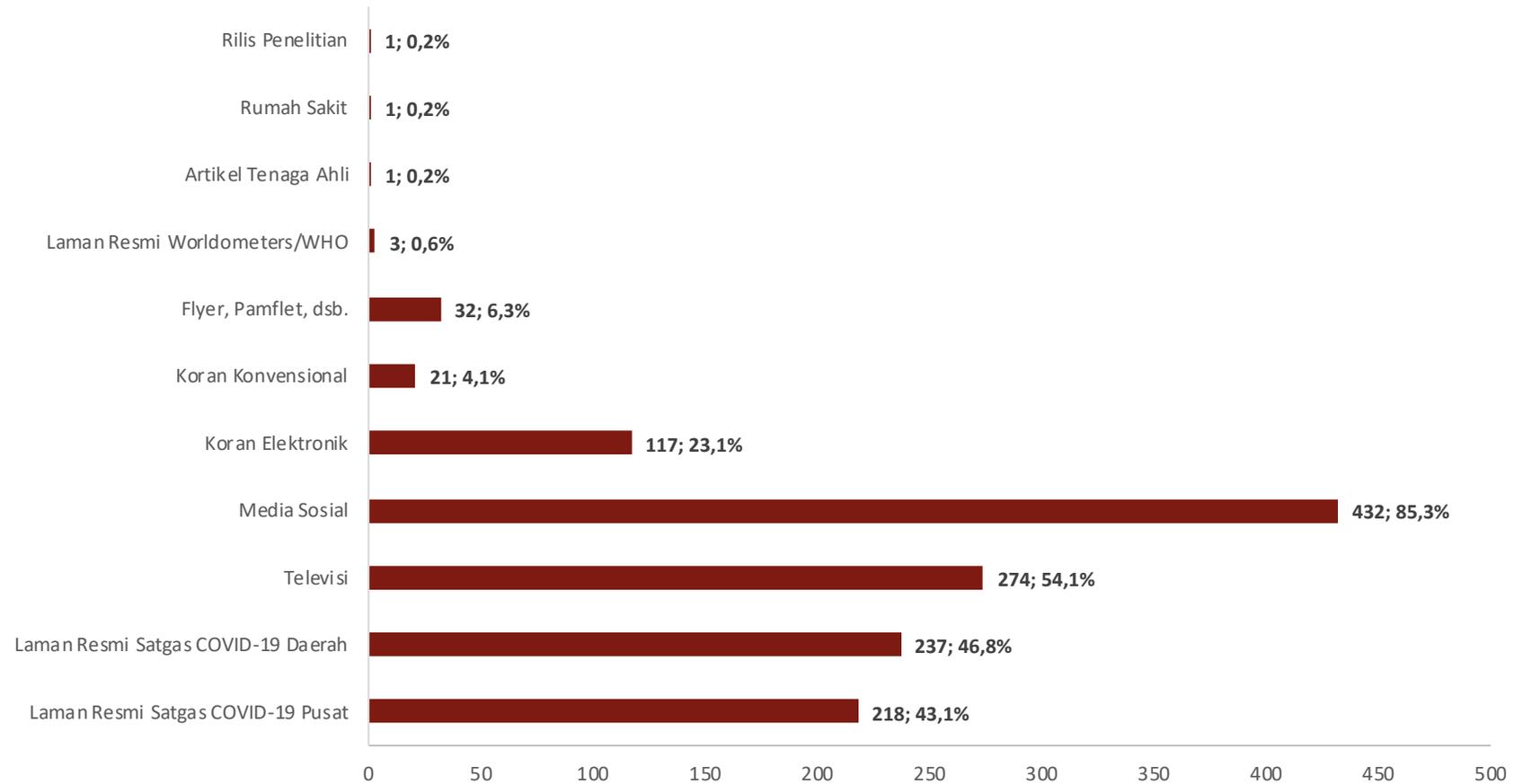
Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Karantina Wilayah



Media dalam Mengakses Informasi COVID-19



Media Informasi yang Digunakan dalam Mengakses Informasi COVID-19





Simpulan, Rekomendasi, dan Saran Implementasi

Simpulan (1)



Kajian tim peneliti UNHAS menunjukkan bahwa tanpa ada intervensi yang tegas dan cepat, jumlah kasus positif di Sulsel dapat mencapai 143.390 orang, dimana puncak pandemi akan terjadi pada bulan Mei. Hal ini perlu menjadi perhatian serius.



Jika menggunakan pertimbangan ekonomi, Makassar sebagai kota pusat pandemi COVID-19 di Sulsel seharusnya sudah menggunakan pendekatan PSBB, karena secara ekonomi justru lebih 'menguntungkan'.



Setidaknya terdapat 6 (enam) sektor di kota Makassar yang perlu diperhatikan karena mengalami penurunan, baik secara lambat maupun signifikan, yaitu: 1) perdagangan; 2) transportasi; 3) industri pengolahan; 4) konstruksi; 5) jasa penyediaan akomodasi, makan dan minum; dan 6) jasa perusahaan.



Estimasi JPS yang dibutuhkan dengan mencakup 40 persen RT terbawah dan pekerja informal di sektor terdampak sebesar Rp214,5 Miliar/Bulan untuk makanan dan non-makanan, dan Rp130,1 Miliar/Bulan jika hanya makanan.



Estimasi JPS yang dibutuhkan jika hanya mencakup 20 persen RT terbawah dan pekerja informal di sektor terdampak sebesar Rp133,2 Miliar/Bulan untuk makanan dan non-makanan, dan Rp81,6 Miliar/Bulan jika hanya makanan.

Simpulan (2)



Berdasarkan realokasi anggaran melalui dua tahap (penyaringan OPD dan Kegiatan), pemerintah kota Makassar dapat merelokasi anggaran sebesar Rp180 Miliar dari 566 kegiatan pada 36 OPD.



Secara umum, survei persepsi masyarakat Makassar menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap pandemi COVID-19 di kota Makassar sudah dalam kondisi sangat genting, dimana persepsi terhadap efektifitas pendekatan *physical distancing* masih sangat bervariasi.



Hampir seluruh responden setuju bahwa perlu dilakukan kebijakan yang lebih tegas. Sebagai contoh, meskipun sudah tidak relevan, mayoritas responden masih berpendapat bahwa kebijakan karantina wilayah perlu diterapkan di kota Makassar. Hal ini dapat dipengaruhi karena hanya sedikit responden yang meyakini bahwa kebijakan PSBB berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya.



Usulkan **PSBB** Sesegera Mungkin!

Hal ini mengacu pada tingkat penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi. Hal dapat memitigasi dampak ekonomi, selain itu kapasitas fiskal Pemerintah Kota Makassar juga sangat memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial selama masa PSBB dilakukan.



Estimasi Kondisi Fiskal Daerah

Pemerintah Kota Makassar perlu segera menghitung dampak Covid-19 terhadap kondisi fiskal daerah sehingga dapat diperoleh informasi secara akurat mengenai kapasitas fiskal daerah.



Peluang Pendanaan

Masih terdapat sejumlah peluang pendanaan dalam membantu membiayai segala kebutuhan pada masa PSBB dijalankan (ex: pusat, provinsi, realokasi ketat, bantuan masyarakat).



Kondisi PSBK

PSBK tidak memiliki landasan yuridis. Pada dasarnya, konsep yang dijalankan juga mirip dengan karantina wilayah.



Apresiasi Masyarakat

Survei menunjukkan masyarakat sangat berharap adanya kebijakan yang lebih tegas, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Rekomendasi Implementasi



Efektifitas Penerapan PSSB

Perlu diperhatikan ketika memilih PSBB: 1) Perencanaan yang memadai terkait penanganan kesehatan COVID-19 dalam 14 hari; 2) Koordinasi yang baik dengan aparat hukum agar PSBB dapat diterapkan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku; 3) Memastikan ketersediaan kebutuhan jaring pengaman sosial dan dibagi secara efektif dan merata.



Sumber Data Penerima Bantuan

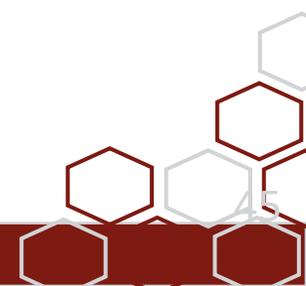
Pemerintah perlu memberikan JPS kepada individu dengan status sosial ekonomi 20-40% terendah dan juga pekerja informal yang terdampak. Agar JPS cepat dan tepat menjangkau kepada individu tersebut, sangat diperlukan pengintegrasian data baik dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) maupun Dinas Sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

JPS Disalurkan dalam Bentuk Barang/Uang

Bantuan JPS sebaiknya diberikan dalam bentuk barang untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di masa pandemi. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan porsi kecil bantuan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan non-makanan yang juga sangat penting, seperti air, gas, dan listrik.

Bentuk UPT Pengelolaan Bantuan Masyarakat

Perlunya segera dibentuk unit yang dapat mengkoordinir bantuan setiap elemen. Khususnya dalam mendata, mengumpulkan, dan menyalurkan bantuan. Hal ini dapat meminimalisir kegiatan sosial dan konflik yang dapat terjadi di masyarakat.





Terima Kasih